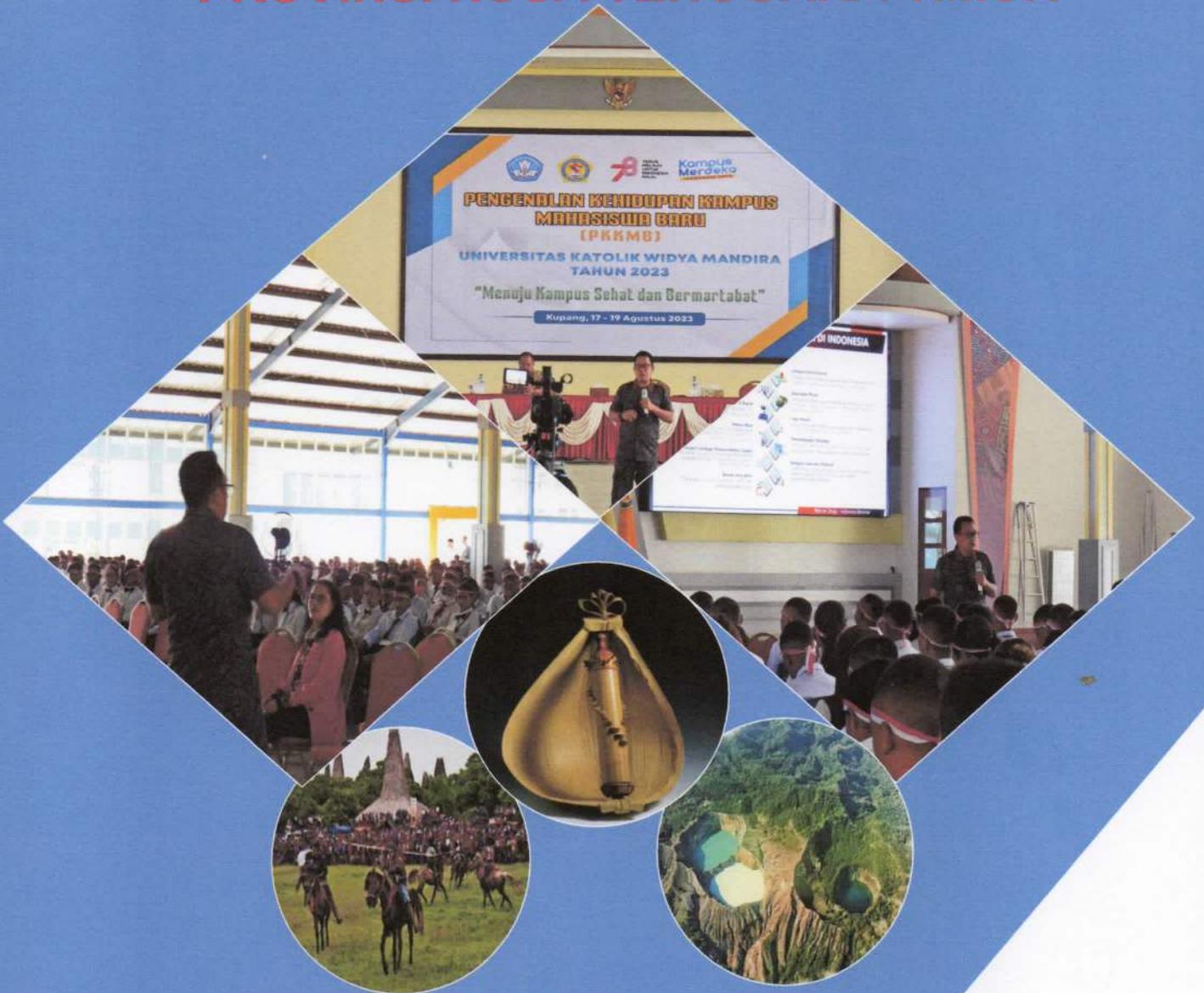




# L K I P

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

### BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



**bnn**

BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Palapa No.1A Oebobo Kota Kupang  
email: [bnnpntt@yahoo.co.id](mailto:bnnpntt@yahoo.co.id)

**WAR ON  
DRUGS**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, **Laporan Akuntabilitas Kinerja Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023** dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap entitas Pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pada Tahun Anggaran 2023, Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Wilayah, telah melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang dalam implementasi program dan kegiatan mengacu pada rencana strategis lembaga dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sebagai gambaran bahwa capaian sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja, ada yang telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat sasaran kinerja yang melebihi target yang ditentukan, di sisi lain, masih terdapat target kinerja yang belum tercapai secara optimal. Keberhasilan dan belum optimalnya pencapaian target dimaksud akan dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Selain itu, rekomendasi yang akan dijadikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan P4GN dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan

laporan maupun kontribusi bentuk lainnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati kita semua, Amin.

Kupang, 29 Januari 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Riki Yanuarfi, S.H., M.Si

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 64, telah mengamanatkan tentang pembentukan kelembagaan Badan Narkotika Nasional, sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Selanjutnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) diatur melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, menetapkan 3 (tiga) Bidang sebagai pilar utama yakni Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan, untuk melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah.

Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai *focal point* dalam penanganan permasalahan narkoba di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki visi sebagai berikut:

<b>VISI</b>	MEWUJUDKAN MASYARAKAT DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG TERLINDUNG DAN TERSELAMATKAN DARI KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM RANGKA MENUJU INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
-------------	---

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi, Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki misi sebagai berikut :

<b>MISI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SECARA PROFESIONAL.</li><li>2. MENINGKATKAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN KETAHANAN MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA.</li><li>3. MENGEMBANGKAN DAN MEMPERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN.</li></ol>
-------------	--

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan tujuan dalam periode 2020-2024 sebagai berikut :

<b>TUJUAN</b>	<b>1. MELINDUNGI DAN MENYELAMATKAN MASYARAKAT DARI PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA. 2. MEWUJUDKAN TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS.</b>
---------------	---

Sedangkan Sasaran strategis Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020-2024 dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

2. Sasaran Strategis 2

Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan Proporsional serta berkinerja Tinggi

Sasaran strategis tersebut dijabarkan menjadi 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan, 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja dan 19 (sembilan belas) target kinerja yang didukung dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) indikator Output Kegiatan. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, dapat diringkas sebagai berikut :

1. IKK jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi NTT target kinerja 3 Kabupaten/Kota. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jajaran melakukan kegiatan Pengembangan Keterampilan Hidup (*softskill*) di SMP dan SMU sederajat dengan target output 1 lembaga dengan realisasi output 1 lembaga atau sebesar 100%, melalui kegiatan Pelatihan Softskill di SMP dan SMU Sederajat dan Informasi dan Edukasi melalui Dialog Interaktif Remaja / Teman sebaya dengan target 10 orang realisasi 10 orang atau sebesar 100%. Realisasi kinerja jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalagunaan narkoba di Wilayah Provinsi NTT, berkategori “Sangat Tinggi”, berjumlah 2 Kab/Kota yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Belu, kategori

- “Tinggi” berjumlah 1 Kab/Kota yaitu Kabupaten Rote Ndao, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan yaitu tercapainya 3 Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja berkategori tinggi.
2. IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalagunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi NTT target kinerja 3 Kabupaten/Kota. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba kepada 10 keluarga dengan capaian realisasi output 10 keluarga atau sebesar 100% melalui Asistensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba dan kegiatan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumberdaya Desa pada 2 desadengan realisasi output 2 desa atau sebesar 100%. Realisasi kinerja Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalagunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi NTT berjumlah 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Belu, atau seluruhnya mencapai target Dekteri kategori tinggi dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, sesuai target kinerja yang ditetapkan.
  3. IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi NTT target kinerja 3 Kabupaten/Kota. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba masing-masing 2 lembaga yaitu Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Kelompok Masyarakat dan Lingkungan Pendidikan dengan realisasi output masing-masing 2 lembaga atau sebesar 100%. Realisasi kinerja Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi berjumlah 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Belu dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
  4. IKK Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" target kinerja 1 kawasan. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Fasilitasi Program *Alternative Development* pada Kelompok

Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika melalui kegiatan pelatihan *life skill* pada 1 Kelompok Masyarakat dengan realisasi output 1 Kelompok Masyarakat atau sebesar 100%. Realisasi kinerja Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga" 1 kawasan atau sebesar 100%, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

5. IKK Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang di intervensi target kinerja 3.17 Indeks dengan realisasi kinerja Nilai keterpulihan kawasan rawan yang di intervensi sebesar 3.21 Indeks atau sebesar 101.3%, melebihi dari target kinerja yang ditetapkan.
6. IKK Persentase Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika yang memiliki peningkatan kualitas hidup. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran melakukan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat serta Pemantauan dan Pendampingan Klien Pascarehabilitasi. Target kinerja IKK Persentase Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika yang memiliki peningkatan kualitas hidup tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 80% dengan realisasi kinerja 93.00 % atau sebesar 116.3%, melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan target IKK Persentase Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika yang memiliki peningkatan kualitas hidup BNN Kabupaten/Kota Jajaran masing-masing sebesar 80%, dengan realisasi kinerja BNN Kabupaten Belu 100% atau sebesar 125%; realisasi kinerja BNN Kabupaten Rote Ndao 91.67% atau sebesar 114.6% dan realisasi kinerja BNN Kota Kupang 85.71 % atau sebesar 107.1%, masing-masing realisasi BNN Kabupaten/Kota Jajaran melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan.
7. IKK Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jajaran melakukan kegiatan pelatihan petugas penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat. Target IKK Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 40 Orang dengan realisasi kinerja 40 Orang atau sebesar 100%, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan target IKK Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih masing-masing BNN Kabupaten/Kota jajaran masing-masing 10 Orang,

dengan realisasi kinerja BNN Kabupaten Belu 10 Orang atau sebesar 100%; realisasi kinerja BNN Kabupaten Rote Ndao 10 Orang atau sebesar 100% dan realisasi kinerja BNN Kota Kupang 10 Orang atau sebesar 100%, masing-masing realisasi BNN Kabupaten/Kota Jajaran sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

8. IKK Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis. Target IKK Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis sebesar 5 Orang dengan realisasi kinerja 0 Orang atau sebesar 0% dari target yang telah ditetapkan. Target tidak tercapai karena adanya kebijakan Pecandangan Belanja atau ***Automatic Adjustment*** (AA) pada alokasi anggaran Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis.
9. IKK Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Operasional di Wilayah Provinsi target kinerja 1 Lembaga. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran melakukan kegiatan Layanan Klinik Pratama. Realisasi IKK Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Operasional di Wilayah Provinsi sebesar 1 Lembaga atau 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan target IKK Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional masing-masing BNN Kabupaten/Kota jajaran 1 Lembaga, dengan realisasi kinerja BNN Kabupaten Belu 1 Lembaga atau sebesar 100%; realisasi kinerja BNN Kabupaten Rote Ndao 1 Lembaga atau sebesar 100% dan realisasi kinerja BNN Kota Kupang 1 Lembaga atau sebesar 100%, masing-masing realisasi BNN Kabupaten/Kota Jajaran sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
10. IKK Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional target kinerja 8 unit. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran melakukan kegiatan Pembentukan unit IBM. Realisasi IKK Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional sebesar 8 Unit atau 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan target IKK Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional masing-masing BNN Kabupaten/Kota jajaran 2 Unit, dengan realisasi kinerja BNN Kabupaten Belu 2 Unit atau sebesar 100%; realisasi kinerja BNN Kabupaten

Rote Ndao 2 Unit atau sebesar 100% dan realisasi kinerja BNN Kota Kupang 2 Unit atau sebesar 100%, masing-masing realisasi BNN Kabupaten/Kota Jajaran sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

11. IKK Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi narkotika target kinerja 3.5 indeks . Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jajaran melakukan kegiatan Layanan Klinik Pratama kepada masyarakat. Realisasi kinerja Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi NTT sebesar 3.86 Indeks atau sebesar 110,3 %, melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan target IKK Indeks kepuasan penerima layanan pada fasilitas rehabilitasi BNN masing-masing BNN Kabupaten/Kota jajaran 3.4 Indeks, dengan realisasi kinerja BNN Kabupaten Belu 3.08 atau sebesar 90.6%, tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan; realisasi kinerja BNN Kabupaten Rote Ndao 4 Indeks atau sebesar 117,6% , melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja BNN Kota Kupang 3.72 Indeks atau sebesar 109,4%, melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan.
12. IKK Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 target kinerja 5 berkas perkara. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara. Realisasi kinerja Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 sebesar 5 berkas perkara dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
13. IKK Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan target kinerja 100 indeks. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika. Realisasi kinerja Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan sebesar 100 Indeks dengan persentase capaian kinerja sebesar 100 %, mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
14. IKK Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika target 100. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Pengawasan dan Perawatan Tahanan

Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU. Realisasi kinerja Nilai tingkat kemanan barang bukti narkotika dan non narkotika sebesar 100 Indeks dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

15. IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara target kinerja 88 indeks . Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Program Dukungan Manajemen dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sesuai dengan realisasi Nilai Kinerja data *SMART* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur nilai kinerja anggaran 90.33 Indeks atau sebesar 102,6%, melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan.
16. IKK Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target 3 BNN Kabupaten / Kota. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Jajaran melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Program Dukungan Manajemen. Realisasi kinerja Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target 0 Kabupaten/Kota dengan persentase capaian kinerja sebesar 0 %, dibawah target kinerja yang telah ditetapkan. Target IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN masing-masing BNN Kabupaten/Kota jajaran dengan rinciaan sebagai berikut : BNN Kabupaten Belu target kinerja Nilai Kinerja Anggaran BNN 95 Indeks dengan realisasi kinerja 83.15 Indeks atau sebesar 87,5 %, dibawah dari target yang telah ditetapkan; BNN Kabupaten Kota Kupang target kinerja Nilai Kinerja Anggaran BNN 87 Indeks dengan realisasi kinerja 86,58 Indeks atau sebesar 99, 5 %, dibawah dari target yang telah ditetapkan dan BNN Kabupaten Rote Ndao target kinerja Nilai Kinerja Anggaran BNN 83 Indeks dengan realisasi kinerja 77,19 Indeks atau sebesar 99,5 %, dibawah dari target yang telah ditetapkan.
17. IKK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur target kinerja 95 Indeks . Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Program Dukungan Manajemen dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN) Sesuai dengan realisasi aplikasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan, IKPA BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur 97.66 Indeks dengan persentase capaian kinerja sebesar 102.59, melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

18. IKK Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target, target 3 BNN Kabupaten / Kota. Realisasi kinerja Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target 2 BNN Kabupaten/Kota dengan persentase 66,7%, dibawah dari target kinerja yang telah ditetapkan. Target IKK Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) masing-masing BNN Kabupaten/Kota jajaran dengan rincian sebagai berikut : BNN Kabupaten Belu target Kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 92 Indeks dengan realisasi kinerja 90.50 Indeks atau sebesar 98,4 %, dibawah dari target yang telah ditetapkan; BNN Kabupaten Kota Kupang target kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 92 Indeks dengan realisasi kinerja 97.32 Indeks atau sebesar 105,8 %, melebihi dari target yang telah ditetapkan dan BNN Kabupaten Rote Ndao target Kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 92 Indeks dengan realisasi kinerja 97,23 Indeks atau sebesar 105,7 %, melebihi dari target yang telah ditetapkan.
19. IKK Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal target kinerja 75 Indeks . Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur pembangunan Zona Integritas Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 menuju Wilaya Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Capaian IK sebesar 71.52 Indeks atau sebesar 95,4%, dibawah dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian IKK Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, maka dapat dijelaskan bahwa IKK diatas target berjumlah 5 (lima), IKK sesuai target berjumlah 10 (sepuluh) dan IKK dibawah target berjumlah 4 (lima) dan IKK tidak mencapai target berjumlah 1 (satu), maka dapat direkomendasi langkah-langkah peningkatan kinerja Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya konsistensi dari pengambil kebijakan di daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, DPRD maupun seluruh stakeholder) untuk melaksanakan kebijakan P4GN tersebut, untuk diimplementasikan secara berkesinambungan.
2. Memaksimalkan capaian kinerja efektifitas diseminasi informasi P4GN dapat dilakukan dengan cara setelah peserta mengikuti kegiatan sosialisasi, harus ada keinginan untuk turut berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran di lingkungan kerja, pendidikan dan masyarakat. Perlu meningkatkan efektifitas media luar ruang untuk memberikan informasi atau pesan bahaya penyalahgunaan narkoba.
3. Perlu adanya peran aktif penggiat anti narkoba dalam mendukung program P4GN di lingkungan masyarakat setelah mengikuti pengembangan kapasitas.
4. Meningkatkan kesadaran untuk secara mandiri atau swadaya dalam menginisiasi masyarakat dan stakeholder guna memperoleh dukungan anggaran pelaksanaan program P4GN.
5. Perlu meningkatkan informasi kepada masyarakat mengenai program layanan rehabilitasi instansi pemerintah dan layanan rehabilitasi komponen masyarakat (klinik pratama BNNP/BNNK, RSUD, puskesmas dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat).
6. Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum di lapangan demi terungkapnya jaringan sindikat yang lebih besar, membangun komunikasi dengan sesama aparat penegak hukum dan saling tukar informasi tentang perkembangan jaringan sindikat yang menjadi target dan mengevaluasi serta mengintensifikasikan kerjasama yang telah terjalin.
7. Meningkatkan pemetaan wilayah narkoba dan meningkatkan penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika dalam rangka pengungkapan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perlu peningkatan kompetensi dan penambahan sumber daya manusia sesuai dengan daftar susunan pegawai pada Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara, terutama yang berkaitan dengan personil Pemberantasan, Rehabilitasi, Analisis Kesehatan, Keuangan, Perencanaan dan Penyuluh

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki visi “Mewujudkan Masyarakat di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Terhindar dan Terselamatkan dari Kejahatan Narkotika dalam rangka Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, selaras dengan visi tersebut, BNN Propinsi Nusa Tenggara Timur berusaha untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), salah satunya melalui penyusunan Laporan Kinerja yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai perwakilan di tingkat Provinsi (BNNP) dan Kabupaten/Kota (BNNK) sebagai Instansi Vertikal.

Dalam melaksanakan tugas, BNNP menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi; pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN ; pelayanan administrasi BNNP; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP, sedangkan BNN Kabupaten dan Kota melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah

Kabupaten/Kota; pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

Untuk mendukung tugas dan fungsi Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun anggaran 2023 Pemerintah mengalokasikan anggaran melalui program dan kegiatan dalam rangka mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan berakhirnya Tahun anggaran 2023, Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi vertikal BNN di daerah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), wajib melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP dan BNNK/Kota. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ini telah merujuk pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN.

### **C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **1. Kedudukan**

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi;
- b. BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
- c. BNNP dipimpin oleh Kepala.

#### **2. Tugas**

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

#### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan perumusan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol;

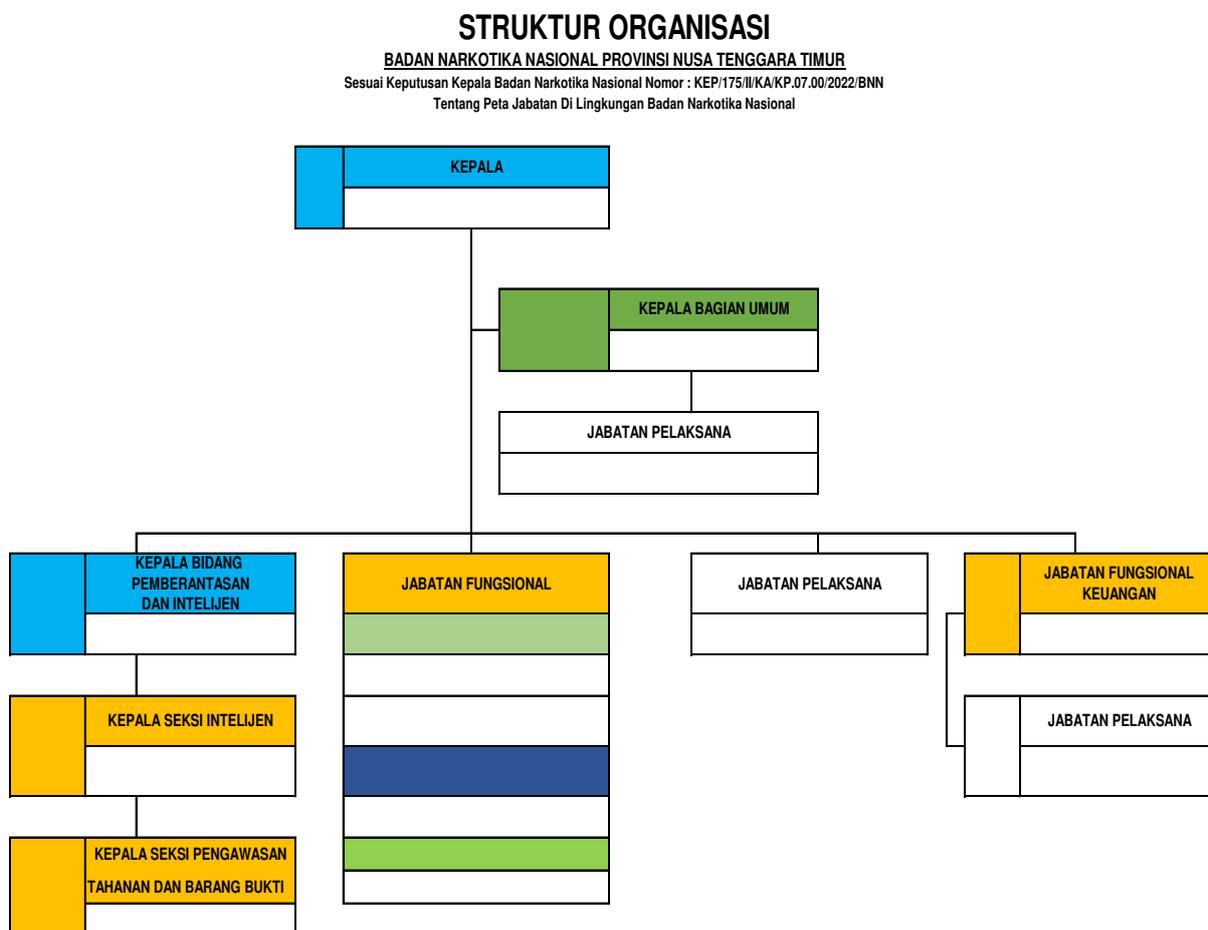
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi , dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. Pelaksanaan layanan hukum kerja sama dalam wilayah Provinsi P4GN.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakatdalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administratif BNNP; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

#### **D. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 175 tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Bidang Rehabilitasi; dan
5. Bidang Pemberantasan dan Intelijen.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur :



Dalam menjalankan organisasi, Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 119 orang yang terdiri dari PNS Organik, PNS dipekerjakan, Penugasan dari instansi Polri, dan PPNP, dengan rincian sebagai berikut :

NO	SATKER	POLRI	PEMDA	BNN	JML	DSP	KET (+/-)	PPNP N	TOTAL PEGAWAI
1	BNNP NTT	13	-	16	29	153	-124	23	52
2	BNNK BELU	-	-	14	14	74	-60	9	23
3	BNN KOTA KUPANG	1	-	6	7	74	-67	14	21
4	BNNK ROTE NDAO	-	-	8	8	74	-66	13	23
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>375</b>	<b>-317</b>	<b>59</b>	<b>119</b>

Dengan kondisi kelembagaan dan SDM sebagaimana tersebut di atas, maka Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terus membutuhkan upaya pengembangan SDM sesuai dengan tuntutan tugas serta tanggungjawab yang dibutuhkannya. Untuk itu Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dituntut harus mampu mengelola keterbatasan sumberdaya yang tersedia secara cermat untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan permasalahan narkoba sesuai dengan tujuan organisasi baik dalam jangka pendek maupun menengah yang tertuang dalam Rencana Program Kerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024.

## **E. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker Wilayah Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- Penjelasan umum organisasi (kedudukan organisasi, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi)
- Sistematika penyajian

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian kinerja organisasi tahun 2023 yang dilaporkan :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan.

B. Realisasi Anggaran :

Realisasi/penyerapan anggaran disertai penjelasan singkat tentang penyerapannya.

#### **Bab IV PENUTUP**

##### **Lampiran**

- Ringkasan Laporan Realisasi Capaian Target dan Anggaran
- Perjanjian Kinerja Organisasi
- Lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran sasaran dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang telah ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020 – 2024.

Didalam Rencana Program Kerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Kegiatan yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang ditungkan dalam perjanjian kinerja antara Kepala BNN RI dengan Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala BNN Kab/Kota dengan Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 1 (satu) Tahun Anggaran .

Perjanjian Kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen antara Kepala BNN RI dengan Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala BNN Kab/Kota dengan Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan P4GN di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **B. Perjanjian Kinerja Satker Wilayah BNNP NTT Tahun 2023**

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi

sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, Perjanjian Kinerja dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel Perjanjian Kinerja**

**Unit Organisasi Eselon II : BNNP Nusa Tenggara Timur**

**Tahun Anggaran : 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten / Kota

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten / Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten / Kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori “ Mandiri” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten / Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “ Waspada”	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3.17 Indeks
6	Meningkatkan Upaya Pemulihan Penyalaguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase Penyalaguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	80%
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih	40 Orang
8	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitas narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah Provinsi	1 Lembaga

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
10	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	8 Unit
11	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN di Provinsi	3.5 Indeks
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	5 Berkas Perkara
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, kesehatan tahanan	100 Indeks
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	88 Indeks
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	3 BNN Kabupaten / Kota
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	92 Indeks
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	3 BNN Kabupaten / Kota

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
19	Meningkatkan pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75 Indeks

1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.	306.110.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.	409.300.000
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp.	845.990.000
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.	101.500.000
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.	166.069.000
6.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.	525.501.000
7.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.	62.534.000
8.	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.	75.000.000
9.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap peredaran Gelap Narkotika	Rp.	416.246.000
10.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.	111.090.000
11.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.	3.563.519.000
12.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.	85.972.000
13.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.	139.073.000
14.	Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp.	5.557.178.000
15.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.	95.000.000

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023**

Sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan pada tahun 2023 Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan, 19 (sebelas belas) target kinerja dan 15 (lima belas) Kegiatan serta 27 (dua puluh tujuh) Rincian Output Kegiatan.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu tahun 2023, evaluasi capaian kinerja yang perlu dilakukan dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2023 merupakan capaian kinerja awal RENPROJA Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020 – 2024, sebagaimana diatur dalam perjanjian kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Tahun 2023 Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil melaksanakan tugas utama di bidang P4GN yang menjadi tugas dan tanggung jawab organisasi. Berikut ini diuraikan capaian kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 :

**1.**

**Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi**

Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah pengukuran ketahanan diri anti narkoba pada remaja sebagai kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

##### **a. Capaian indikator kinerja**

Target kinerja Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi sebanyak 3 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kegiatan Pengembangan Keterampilan Hidup (*softskill*) di SMP dan SMU sederajat dan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika tingkat BNNK, realisasi Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi NTT sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi	3 kab/kota	3 kab/kota	100

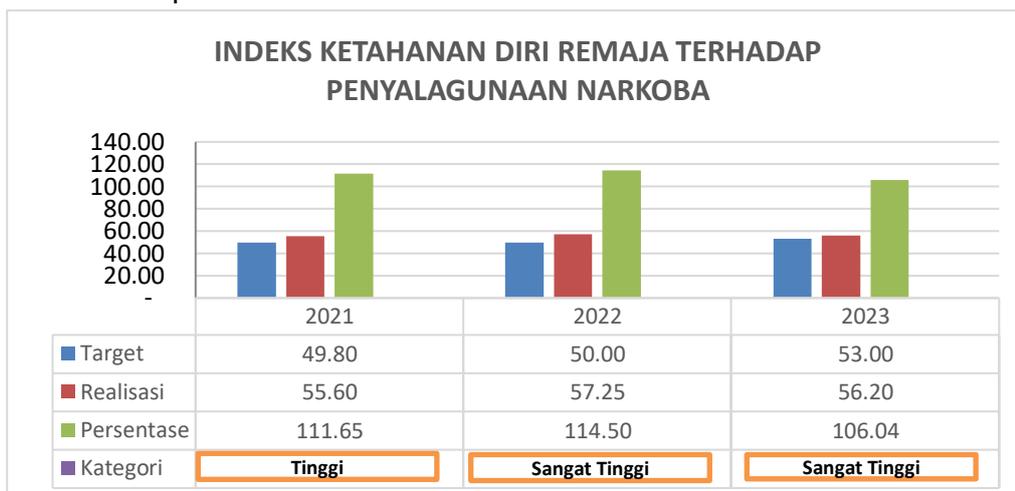
Adapun nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba pada tingkat BNNP dan BNNK Jajaran sebagai berikut :

No	Satker	Target	Realisasi	%	Kategori
1	BNNP NTT	51	51.54	101.05	Tinggi
2	BNNK Belu	53	56.2	106	Sangat Tinggi
3	BNN Kota Kupang	53	53.65	101.2	Sangat Tinggi
4	BNNK Rote Ndao	51	51.24	100,47	Tinggi
	<b>Prov NTT</b>	<b>52</b>	<b>53.16</b>	<b>102.23</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

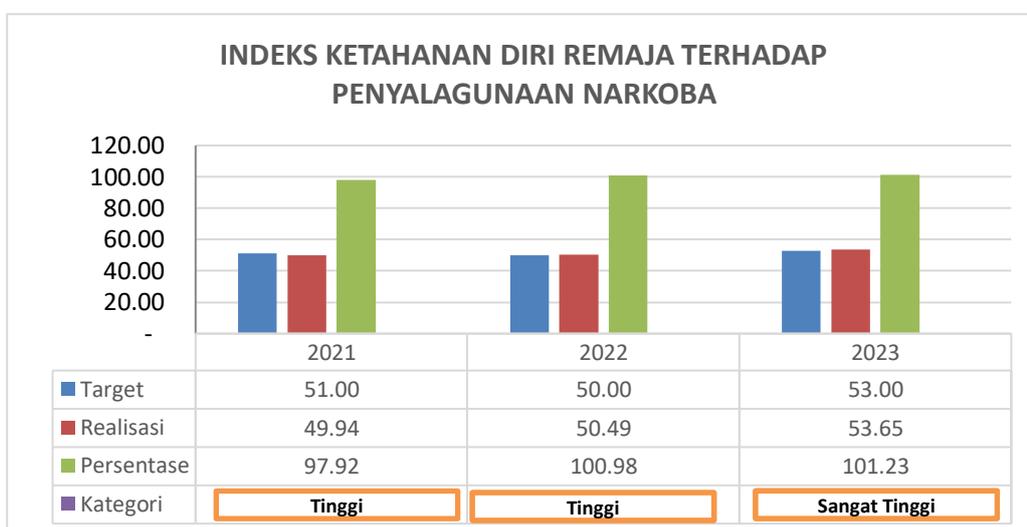
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan hasil perhitungan indeks ketahanan diri anti narkoba terhadap remaja usia 12 s.d. 21 tahun (pelajar dan mahasiswa) yang telah dilakukan penyuluhan/sosialisasi sebanyak 21.229 orang oleh penyuluh BNNP dan BNNK berkategori sangat tinggi dengan nilai 53,16 melampaui target sebesar 52 sehingga capaian sebesar 102,23%.

Berikut disajikan data pembandingan realisasi target kinerja Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.

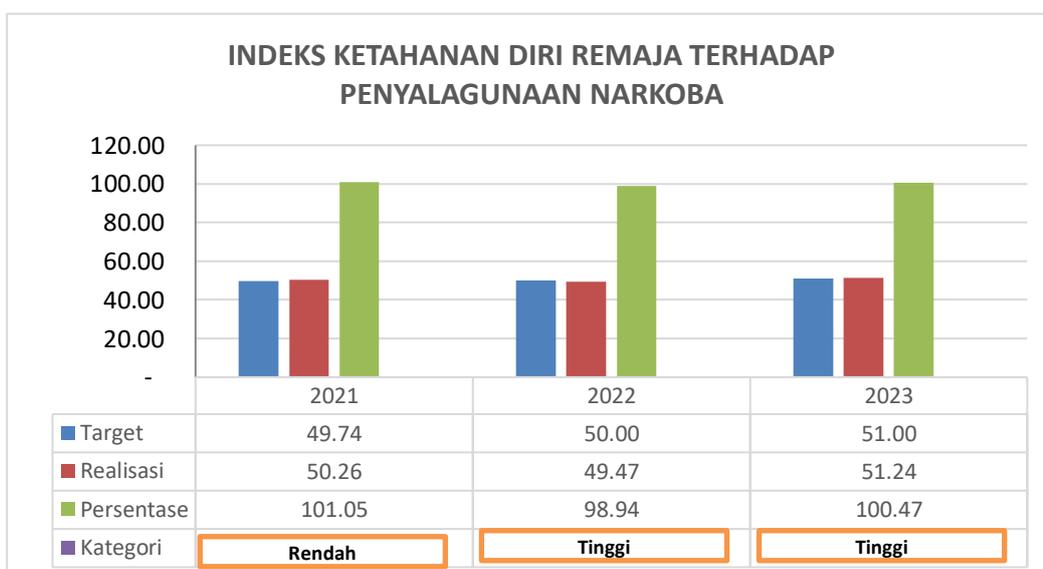
### 1. BNN Kabupaten Belu



### 2. BNN Kota Kupang



### 3. BNN Kabupaten Rote Ndao



## **b. Metode Pengukuran**

Para Siswa yang telah mendapatkan pengembangan *softskill* anti narkoba mengisi kuesioner secara *online* pada aplikasi Dektari Aja. Jawaban responden akan menggambarkan kemampuan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang meliputi dimensi:

### **a. Self regulation**

Kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri.

### **b. Assertiveness**

Kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas.

### **c. Reaching out**

Kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Analisa pengukuran indeks dari jawaban para responden ini dihitung secara *online* pada aplikasi Dektari Aja, dan didapatkan hasil capaian tiap Kabupaten sesuai kategorisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja sebagaimana tabel diatas. Analisa pengukuran indeks dari jawaban para responden ini dihitung secara *online* pada aplikasi Dektari Aja, dan didapatkan hasil capaian tiap Kabupaten sesuai kategorisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja sebagaimana table diatas. Adapun dari 3 Kabupaten/Kota jajaran BNNP NTT, 2 Kabupaten/Kota memiliki capaian Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Sangat Tinggi” yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Belu. Sedangkan 1 Kabupaten memiliki Indeks Ketahanan Diri “Tinggi” yaitu Kabupaten Rote Ndao.

Adapun perhitungan persenta sejumlah kabupaten/kota dengan capaian Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi sebagai berikut :

*Perhitungan Capaian :*

<b>% Capaian</b>	:	$\frac{3 \text{ Kab/Kota}}{3 \text{ Kab/Kota}}$	x 100% = 100 %
------------------	---	---	----------------

### c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan dari ketiga Kabupaten/Kota memiliki indeks ketahanan diri remaja berkategori tinggi, hal ini didukung beberapa faktor antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan informasi dan edukasi yang tersusun secara baik melalui pembuatan timeline.
2. Koordinasi yang baik antara BNNP NTT dan Jajaran dengan stakeholder terkait.
3. Partisipasi aktif stakeholder dalam mendukung program kerja BNNP NTT dan Jajaran.
4. Pelaksanaan sosialisasi kepada remaja sesuai dengan dimensi ketahanan diri remaja anti narkoba.
5. Pemahaman sasaran terhadap konsep ketahanan diri dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
6. Metode sosialisasi cukup efektif meningkatkan pemahaman remaja terhadap pencegahan narkoba.
7. Keterpedulian lingkungan sekolah dalam upaya P4GN yang melibatkan pada siswa/i.

### d. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi BNN Provinsi Jajaran terhadap pencapaian target kinerja tersebut diatas, antara lain :

1. Kurangnya SDM Penyuluh Narkoba sebagai fasilitator di Kabupaten/Kota.

2. Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektari tidak didampingi dan dipandu oleh Fasilitator, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan dalam pemahaman isi kuesioner dan kesalahan dalam penginputan.

**e. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut  
Menyebarkan informasi P4GN melalui berbagai metode dan media yang sesuai perkembangan jaman secara masif, efektif, efisien dan tepat sasaran kepada keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja dan kelompok masyarakat:

- 1) Menyebarkan informasi P4GN melalui berbagai metode dan media yang sesuai perkembangan jaman secara masif, efektif, efisien dan tepat sasaran kepada keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja dan kelompok masyarakat.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder dan media untuk mencapai *outcome* yang diharapkan.
- 3) Membuat terobosan dan inovasi dalam melakukan KIE tentang P4GN untuk menarik simpati masyarakat seperti lomba-lomba kreatif yang melibatkan masyarakat.
- 4) Membuat terobosan yang inovatif dan masif dalam KIE P4GN seperti melalui Lembaga Pendidikan dengan mengintegrasikan materi Pendidikan anti narkoba kedalam kurikulum mata pelajaran.
- 5) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan di lingkup BNNP dan BNNK/Kota.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan.
- 7) Peningkatan kapasitas fasilitator melalui pelatihan.

**f. Inovasi yang telah dilakukan selama Tahun 2023**

Inovasi yang telah dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya meningkatkan ketahanan diri remaja anti narkoba selama tahun 2023 antara lain :

- 1) Penyebarluasan informasi dan edukasi melalui pelaksanaan lomba kreatif, seperti film, quotes, pantun, dan video singkat;
- 2) Penyebarluasan informasi dan edukasi melalui konten kreatif di media sosial BNNP NTT Jajaran;
- 3) Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan seperti Kwarda dan Kwarcab dalam peningkatan KIE P4GN dengan Pelajar secara berkelanjutan;
- 4) Integrasi materi pendidikan anti narkoba di Tingkat sekolah menengah.

**2.**

**Indikator Kinerja: Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi**

Indeks ketahanan keluarga anti narkoba adalah pengukuran keterampilan hidup keluarga anti narkoba dalam membentuk daya tangkal terhadap segala bentuk ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

**a. Capaian indikator kinerja**

Dalam perjanjian kinerja BNNP NTT dan BNNK Jajaran pada Tahun 2023 target Kabupaten/Kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi sebanyak 3 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kegiatan advokasi pembangunan berawasan anti narkoba yang telah dilaksanakan BNNP NTT dan BNNK Jajaran Tahun 2023 melalui Asistensi/Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba, capaian Jumlah Kabupaten/Kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Kab/Kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	3 kab/kota	3 kab/kota	100 %

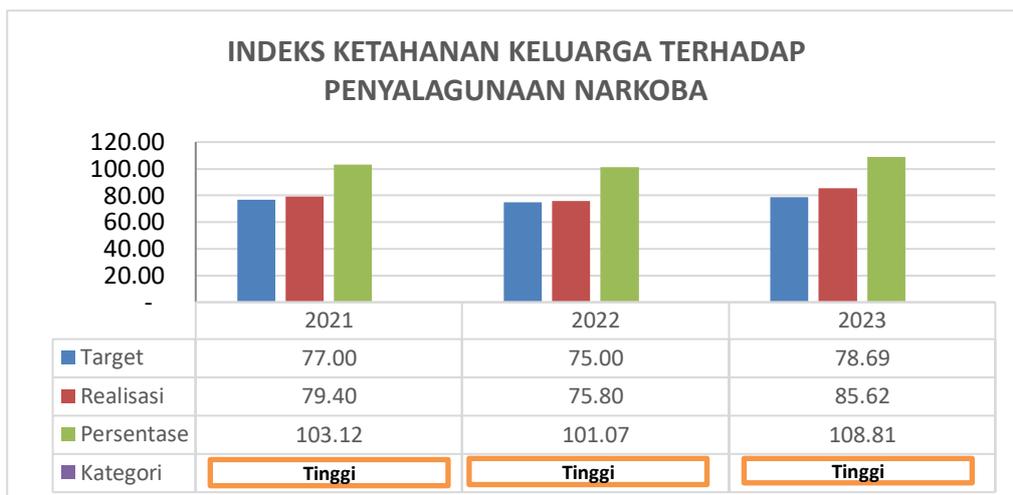
Dengan nilai Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada tingkat BNNP dan BNNK Jajaran sebagai berikut :

No	BNNK	Target	Realisasi	%	Kategori
1	BNNP NTT	78.68	87,589	111.32	Tinggi
2	Belu	78.69	85.62	108.6	Tinggi
3	Kota Kupang	77	81.33	105.6	Tinggi
4	Rote Ndao	76.70	88.12	114.9	Tinggi
	<b>Prov NTT</b>	<b>77.77</b>	<b>85.66</b>	<b>110.13</b>	<b>Tinggi</b>

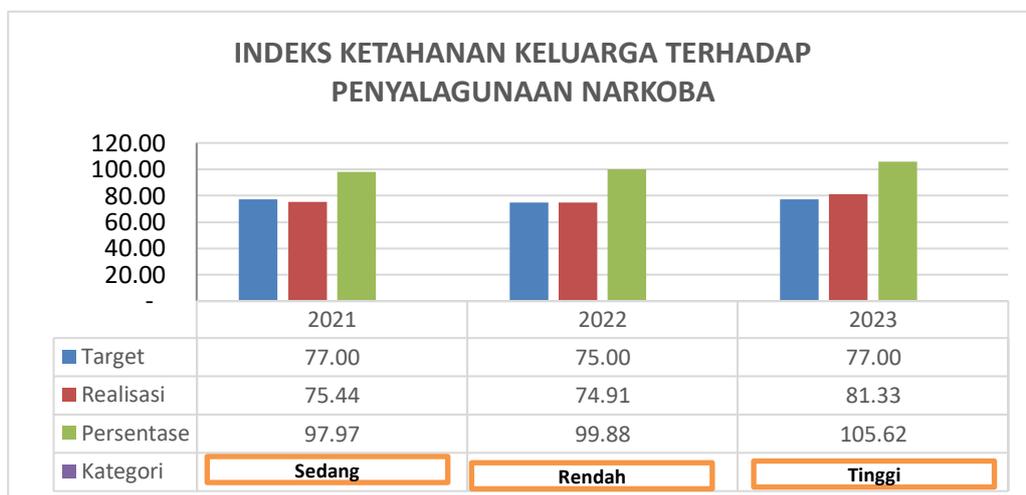
Adapun indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba secara keseluruhan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mencapai target Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 85.66 kategori Tinggi, dan seluruh Kabupaten/Kota (3 Kabupaten/Kota) mencapai target Indeks Ketahanan Keluarga dengan Kategori Tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indeks ketahanan keluarga anti narkoba di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 100%.

Berikut disajikan data pembandingan realisasi target kinerja Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.

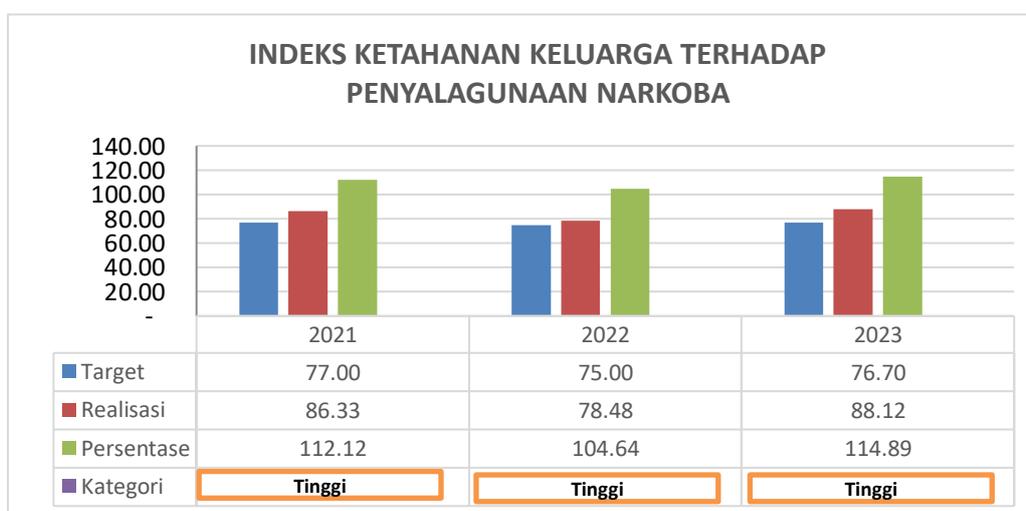
### 1. BNN Kabupaten Belu



### 2. BNN Kota Kupang



### 3. BNN Kabupaten Rote Ndao



## b. Metode Pengukuran

Pengukuran indeks ketahanan keluarga anti narkoba dilakukan melalui pengisian kuesioner secara *online* menggunakan aplikasi dektara. Fasilitator memandu peserta dalam mengisi aplikasi untuk mengukur sejauh mana keluarga memiliki keterampilan hidup anti narkoba yang dilaksanakan sesuai dengan dimensi dan indikator ketahanan keluarga anti narkoba, antara lain :

- 1) *Belief system* (Sistem keyakinan) merupakan dasar nilai, pendirian, sikap, yang menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 2) *Organizational Process (proses organisasi)*. Struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 3) *Communication/problem-solving processes (proses komunikasi)*. Suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Dari pengukuran secara *online*, diperoleh hasil bahwa dari 3 kabupaten/kota memiliki indeks ketahanan keluarga semuanya berkategori “tinggi”. Adapun perhitungan persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga berkategori “Tinggi” sebagai berikut :

*Perhitungan Capaian :*

$$\text{Realisasi : } \frac{3 \text{ Kab/Kota}}{3 \text{ Kab/Kota}} \times 100 \% = 100 \%$$

## c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan tiga Kabupaten/Kota memiliki indeks ketahanan keluarga berkategori tinggi, hal ini didukung beberapa faktor antara lain :

1. Pelaksanaan fasilitasi ketahanan keluarga anti narkoba di Kab/Kota sudah berjalan maksimal, didukung SDM yang sudah berkompoten sebagai fasilitator.

2. Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektara sudah sesuai dengan ketentuan.
3. Partisipasi aktif keluarga dalam mengikuti pelaksanaan program ketahanan keluarga.
4. Konsistensi praktek peserta pasca fasilitasi sudah berjalan maksimal.
5. Ketahanan keluarga sudah menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait.

**d. Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi pelaksana program dalam rangkaian pelaksanaan advokasi intervensi ketahanan keluarga pada tahun 2023 antara lain :

- 1) Pelaksanaan fasilitasi ketahanan keluarga anti narkoba di Kabupaten/Kota masih kurang berjalan maksimal, karena kurangnya SDM sebagai fasilitator.
- 2) Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektara tidak didampingi dan dipandu oleh Fasilitator, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan dalam pemahaman isi kuesioner dan kesalahan dalam penginputan.
- 3) Kurangnya partisipasi aktif keluarga dalam mengikuti pelaksanaan program ketahanan keluarga.
- 4) Konsistensi praktek peserta pasca fasilitasi tidak berjalan maksimal di Kabupaten Belu dan Kota Kupang.
- 5) Ketahanan keluarga belum menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait.

**e. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Indeks ketahanan keluarga anti narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Nusa Tenggara Timur, maka rencana aksi dan strategi kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan petugas/fasilitator melalui pelatihan/pembekalan/workshop.
- 2) Memilih peserta ketahanan keluarga lebih selektif lagi berdasarkan aspek responsif dan partisipasi aktif di lingkungan masyarakat, serta

merupakan warga masyarakat yang menjadi tokoh/panutan di lingkungannya.

- 3) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program ketahanan keluarga.
- 4) Peningkatan pengawasan atau evaluasi dalam pelaksanaan ketahanan keluarga.

**f. Inovasi yang telah dilakukan selama Tahun 2023**

Inovasi yang telah dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya meningkatkan indeks ketahanan keluarga anti narkoba selama tahun 2023 antara lain :

- 1) Bersinergi dan kolaborasi bersama dengan TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan dalam pelaksanaan Fasilitasi Ketahanan keluarga secara berkelanjutan.
- 2) Pelatihan fasilitator pelaksana program ketahanan keluarga dengan melibatkan anggota TP PKK.

**3.**

**Indikator Kinerja: Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi**

Indeks Kemandirian Partisipasi adalah Pengukuran kemandirian penggiat anti narkoba yang berperan aktif dalam program pemberdayaan anti narkoba di lingkungannya, meliputi lingkungan instansi pemerintah, dunia usaha/swasta, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Diharapkan peran penggiat anti narkoba secara mandiri dalam P4GN ini mampu berdaya guna dan berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkoba dan pasokan sediaan narkoba.

**a. Capaian indikator kinerja**

Target perjanjian kinerja untuk indikator Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 3 Kab/Kota, dengan rincian capaian sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Satker</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi</b>
1	BNNP NTT	3	3	100 %

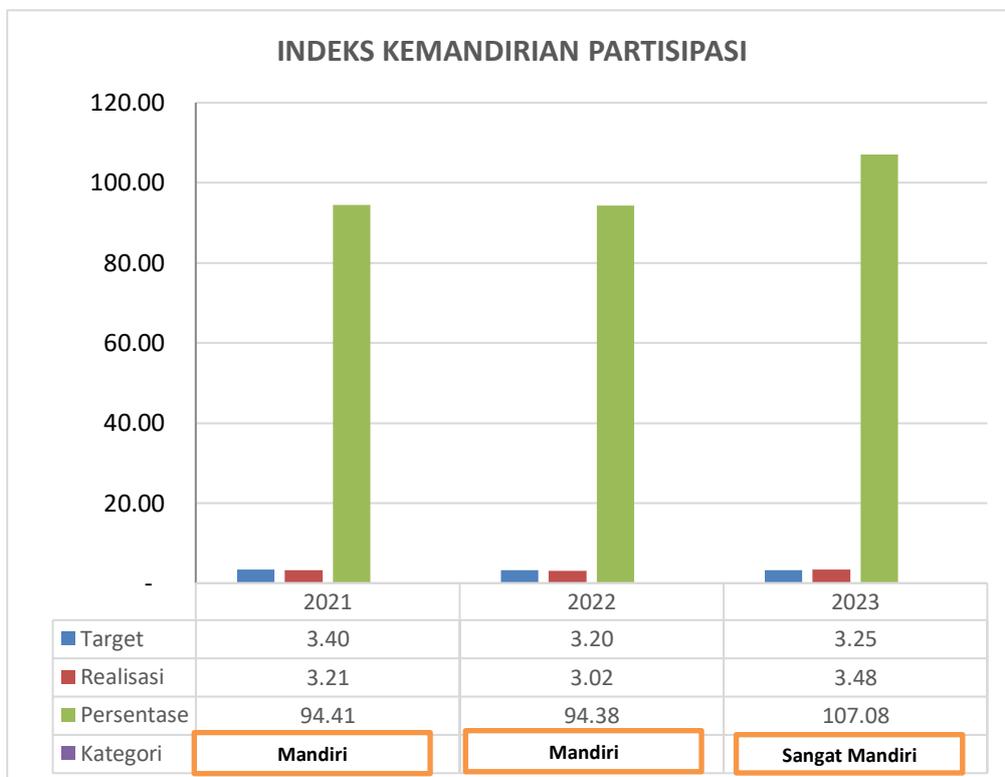
Dengan rincian nilai Indeks Kemandirian Partisipasi pada BNNP dan tingkat BNNK Jajaran sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>BNNK</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Kategori</b>
1	BNNP NTT	3.25	3.43	105.53	Sangat Mandiri
2	Belu	3.25	3.48	107.1	Sangat Mandiri
3	Kota Kupang	3.25	3.53	108.6	Sangat Mandiri
4	Rote Ndao	3.22	3.33	103.4	Sangat Mandiri
	IKP NTT	3.24	3.44	106.17	Sangat Mandiri

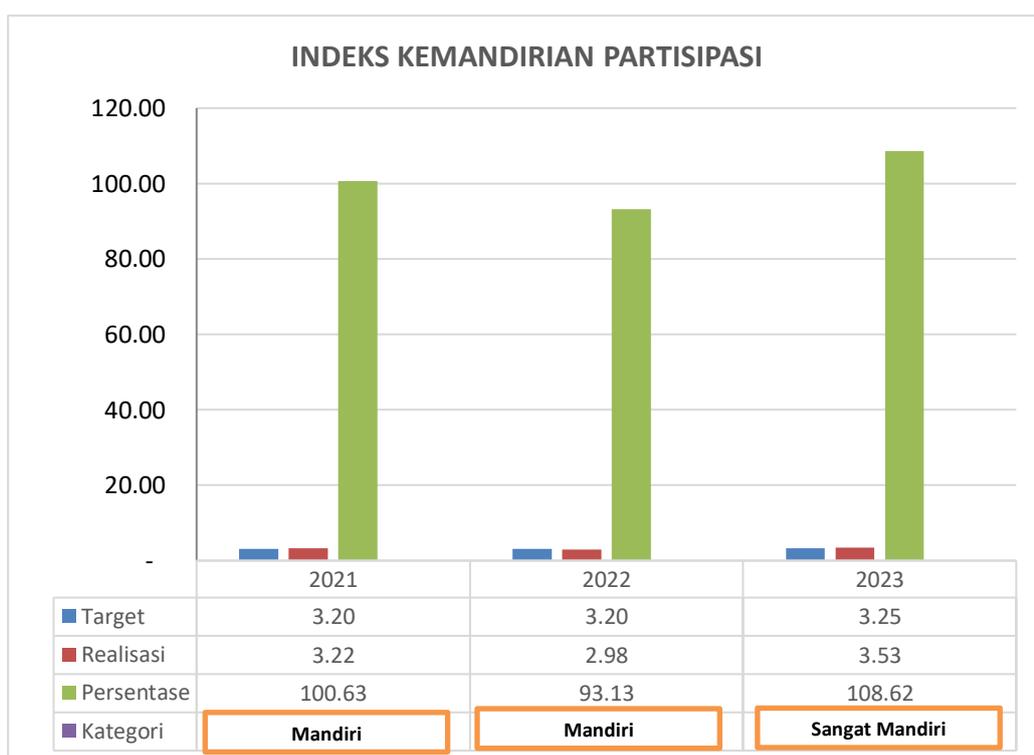
Seluruh BNNK Jajaran di wilayah Provinsi NTT mencapai target Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri”, dengan capaian 3 BNNK memiliki nilai IKP kategori “Sangat Mandiri” termasuk capaian pemberdayaan peran serta masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berikut disajikan data pembandingan realisasi target kinerja Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.

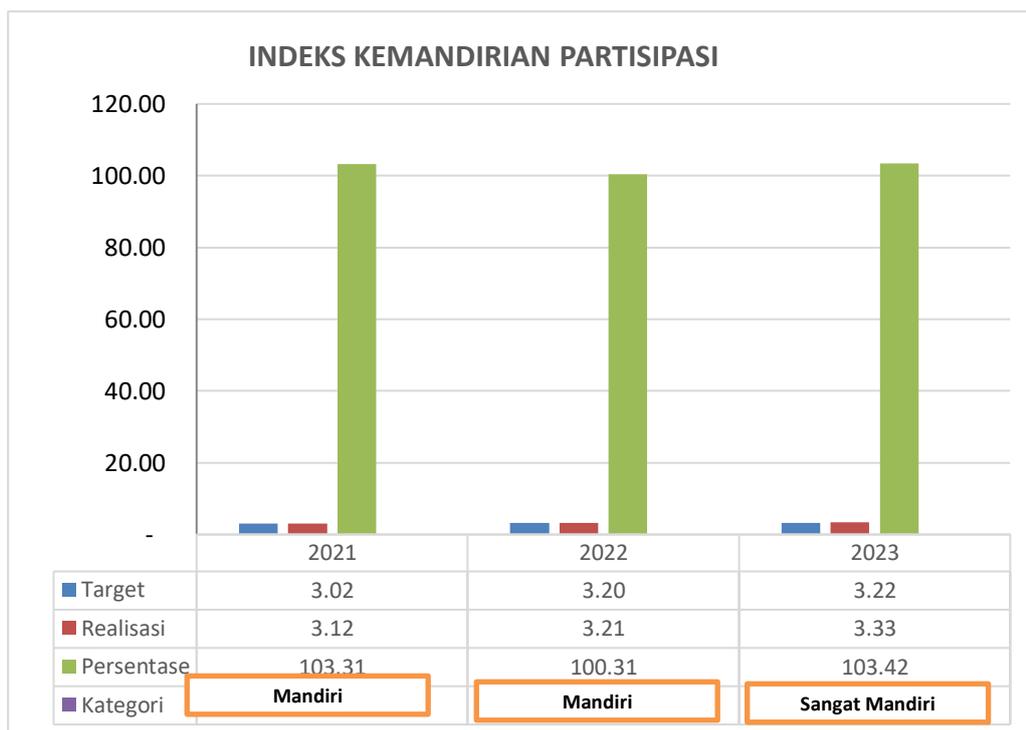
1. BNN Kabupaten Belu



2. BNN Kota Kupang



### 3. BNN Kabupaten Rote Ndao



#### b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran indeks kemandirian partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan P4GN diukur menggunakan kuesioner IKP yang meliputi 5 aspek yaitu: aspek manusia, metode, anggaran, sistem, sarana prasarana, dan kegiatan. Kuesioner dibagikan dan diisi oleh penggiat anti narkoba dari instansi/lembaga yang telah mendapatkan pengembangan kapasitas P4GN baik melalui workshop maupun bimtek P4GN. Untuk memperoleh nilai IKP dari masing – masing lembaga, penghitungan dilakukan dengan rumus :

$$\text{IKP} = \frac{\text{Hasil Perhitungan Kuesioner}}{25}$$

Kemudian dari hasil indeks yang diperoleh dapat ditentukan kategori kemandirian dengan interval sebagai berikut :

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

Adapun rincian capaian indeks kemandirian partisipasi penggiat anti narkoba di wilayah BNNP NTT dan jajaran per lingkungan sebagai berikut :

NO	Satker	Instansi Pemerintah	Dunia Usaha/swasta	Lingk. Masyarakat	Lingk.Pendidikan	= $\Sigma$ % capaian indeks	Kategori/Kriteria
1	BNNP NTT	-	-	3.42	3.44	3.43	Sangat Mandiri
2	BNNK Kupang	3.40	-	-	3.66	3.53	Sangat Mandiri
3	BNNK Rote Ndao	-	-	3.40	3.27	3.33	Sangat Mandiri
4	BNNK Belu	-	-	3.40	3.56	3.48	Sangat Mandiri

**Tabel 2.Indeks Kemandirian Partisipasi Pemberdayaan Peran serta Masyarakat di Lingkungan BNNP NTT Tahun 2023**

NO	Satker	KRITERIA	PERHITUNGAN			
			PMRNTH	SWASTA	MASY.	PNDKKN
1	BNNP NTT	Nilai IKP Setelah Dikonversi	-	-	3.42	3.44
		Nilai Interval Konversi Dikalikan 25	-	-	85.5	86.00
		Kategori IKP	-	-	A	A
		Kriteria Kemandirian Partisipasi	-	-	Sangat Mandiri	Sangat Mandiri
2	BNNK Kupang	Nilai IKP Setelah Dikonversi	3.40	-	-	3.66
		Nilai Interval Konversi Dikalikan 25	85.00	-	-	91.5
		Kategori IKP	A	-	-	A
		Kriteria Kemandirian Partisipasi	Sangat Mandiri	-	-	Sangat Mandiri
3	BNNK Rote Ndao	Nilai IKP Setelah Dikonversi	-	-	3.40	3.27
		Nilai Interval Konversi Dikalikan 25	-	-	85.00	81.75
		Kategori IKP	-	-	A	A
		Kriteria Kemandirian Partisipasi	-	-	Sangat Mandiri	Sangat Mandiri
4	BNNK Belu	Nilai IKP Setelah Dikonversi	-	-	3.40	3.56
		Nilai Interval Konversi Dikalikan 25	-	-	85.00	89.00
		Kategori IKP	-	-	A	A
		Kriteria Kemandirian Partisipasi	-	-	Sangat Mandiri	Sangat Mandiri

**Tabel 3. Capaian Advokasi Lembaga Berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba**

NO	Satker	Instansi Pemerintah	Instansi swasta	Kelompok Masyarakat	Lingkungan pendidikan
1	BNNP NTT	-	-	1. Kwarcab Kupang (3.48) 2. APK3 Kupang(3.48)	1. SMA Citra Bangsa (3.48) 2. SMK Reformasi (3.48)
2	BNNK Belu	-	-	1. Kelurahan Beirafu (3.09) 2. Desa Maumutin (3.72)	1. Politeknik Ben Mboi (3.80) 2. SMAN 3 Atambua (3.32)
3	BNNK Kupang	1. DPPPA Kota Kupang (3.92) 2. Dinas Perhubungan Kota Kupang (4.00)	-	-	1. SDI Liliba (3.64) 2. SD GmitKuanino 3 (4.00)
4	BNNK Rote Ndao	-	-	1. GMIT Klasis Rote Barat (3.64) 2. GMIT Klasis Lobalain (3.52)	1. SD Inpres 2 Ba'a (3.72) 2. SDN 1 Ba'a (3.72)

*Perhitungan Capaian :*

<p>Realisasi: <math>\frac{3 \text{ Kab/Kota}}{3 \text{ Kab/Kota}} \times 100\% = 100\%</math></p>
---

Dari data diatas jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi “Mandiri” pada tingkat BNNK adalah sebanyak 3 BNN Kab/Kota, dengan capaian target sebesar 100%.

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor keberhasilan pencapaian target jumlah instansi/lembaga yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba sebesar 100% adalah :

- a. Intensifikasi advokasi kepada stakeholder terkait yang menjadi penggiat anti narkoba dalam upaya P4GN di lingkungannya masing-masing.
- b. Komitmen dan dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan P4GN di lingkungannya masing-masing untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Tanggap ancaman Narkoba.

- c. Pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan anti narkoba yang efektif, efisien dan tepat sasaran.
- d. Program pemberdayaan masyarakat anti narkoba dilaksanakan sesuai dengan standar aktifitas dan *timeline* yang telah ditetapkan di awal tahun.
- e. Hubungan dan kerjasama yang baik BNNP NTT dan BNNK/Kota dengan stakeholder dan pemegang kebijakan.
- f. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di setiap komponen masyarakat.
- g. Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah menerbitkan beberapa regulasi diantaranya :
  - a) Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan P4GN.
  - b) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN.
  - c) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 47 Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif di Kabupaten Rote Ndao.
  - d) Surat Edaran Walikota Kupang Nomor: BAG.KESRA.001/354/I/2019, tanggal 11 Januari 2019 tentang Pelaksanaan P4GN di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
  - e) Surat Edaran Bupati Belu Nomor: BKBP-354/276/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Pelaksanaan P4GN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

Selain itu, dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat anti narkoba juga menghadapi beberapa kendala diantaranya :

- a) Pemahaman dan komitmen para stakeholder tentang P4GN belum memadai, dan masih beranggapan bahwa tugas P4GN hanya tugas BNN semata;
- b) Alokasi anggaran P4GN yang tersedia belum mengakomodir daerah kepulauan, sehingga program pemberdayaan anti

narkoba hanya bisa menjangkau Kabupaten/Kota yang ada BNNKnya saja;

- c) Kesulitan dalam pelaksanaan monev program karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk biaya akomodasi ke Kabupaten sasaran. Monev hanya dilakukan via telepon, email, maupun media elektronik lainnya, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal (tidak semua stakeholder memberikan feed back, dan kendala sarana prasarana media (tidak mempunyai email/whatsapp));
- d) Tidak semua stakeholder mampu menganggarkan biaya untuk P4GN, terutama pelaksanaan tes urine (rata-rata daerah di NTT memiliki PAD rendah, dengan program anggaran saat ini lebih dititik beratkan pada penanganan covid-19 dan pembangunan infra struksur, sehingga cukup sulit untuk mengalokasikan biaya pengadaan alat tes urine narkoba di setiap pemerintah kabupaten.

#### **d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan jumlah instansi/lembaga yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dalam rangka advokasi kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.
- 2) Mendorong pemerintah daerah, lingkungan pendidikan, dunia usaha dan masyarakat agar melaksanakan upaya P4GN di lingkungannya melalui penyebaran informasi P4GN, deteksi dini dan pembentukan satgas P4GN.
- 3) Terus berupaya menginisiasi dan memotivasi para penggiat agar dapat melakukan kegiatan P4GN yang tidak membutuhkan biaya (seperti kampanye dan sosialisasi anti narkoba pada kegiatan-kegiatan yang sudah ada/insert).
- 4) Mendorong instansi/lembaga membentuk penggiat anti narkoba di lingkungannya masing-masing.

- 5) Meningkatkan peran instansi/lembaga dan penggiat yang telah dibentuk untuk berpartisipasi aktif mendukung program P4GN.

**e. Inovasi yang telah dilakukan selama Tahun 2023**

Inovasi yang telah dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya meningkatkan indeks kemandirian partisipasi Lembaga selama tahun 2023 antara lain :

- 1) Cooperation/bekerjasama dengan Instansi/Lembaga Pendidikan dalam peningkatan dayatangkal remaja anti narkoba melalui integrasi materi pendidikan anti narkoba di sekolah.
- 2) Kolaborasi dengan komunitas pemuda dan komunitas Masyarakat dalam P4GN.
- 3) Membuat lomba-lomba kreatif BNN untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam P4GN.

**4.**

**Indikator Kinerja: Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"**

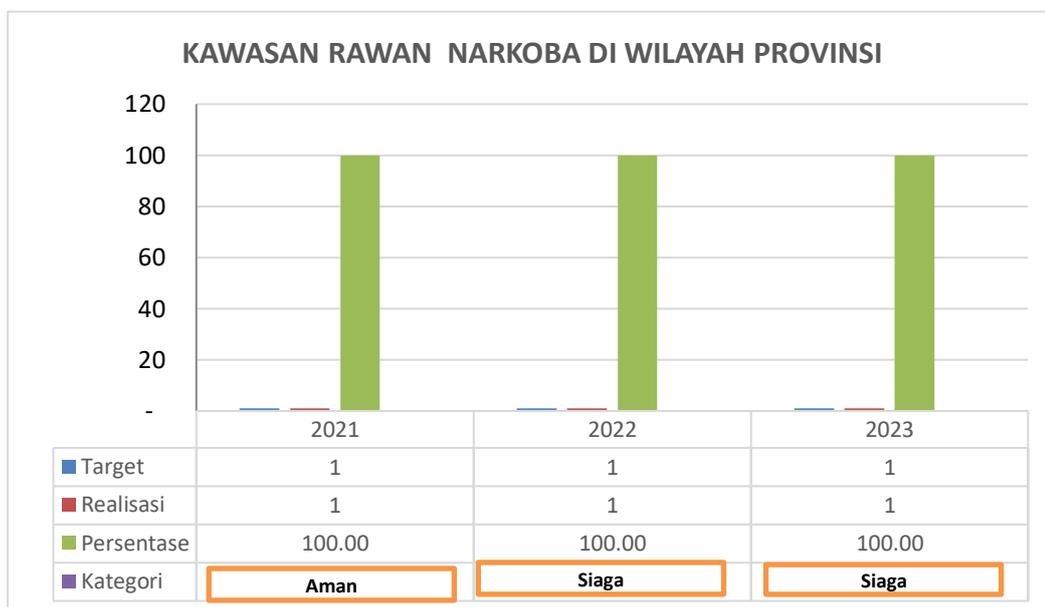
Program pemberdayaan alternatif hanya dilaksanakan di tingkat BNNP NTT, dikarenakan BNNK belum mendapatkan anggaran untuk program pemberdayaan kawasan/wilayah rawan tersebut.

**a. Capaian indikator kinerja**

Target Jumlah kawasan/wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan alternatif sesuai Perjanjian kinerja BNNP NTT tahun 2023 sebanyak 1 kawasan. Berdasarkan kegiatan pemberdayaan alternatif yang telah dilaksanakan BNNP NTT pada kawasan/wilayah rawan yang diintervensi sebanyak 1 kawasan Tahun 2023 dengan capaian sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 kawasan	1 kawasan	100%

Berikut disajikan data pembandingan realisasi target kinerja Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.



Adapun kawasan rawan yang menjadi sasaran pelaksanaan program pemberdayaan alternatif pada tahun 2023 adalah Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu melalui kegiatan rapat kerja dengan stakeholder, pelatihan *life skill* di bidang pembuatan pupuk kompos, pemberian bantuan peralatan dan bahan kerja, serta monitoring evaluasi.

Kegiatan bimbingan teknis *life skill* bagi masyarakat di kawasan rawan narkoba dengan jenis pelatihan pertanian pengelolaan sampah menjadi produk pupuk kompos berkualitas kepada 1 kelompok masyarakat di Kelurahan Beirafu yang terdiri dari 15 orang. Tempat pelaksanaan pelatihan di Kantor Kelurahan Beirafu serta praktek lapangan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu.

NO	Satker	Kawasan	Pelatihan life skill	Keterangan
1	BNNP NTT	1 kawasan	15 orang	lifeskillbagimasyarakatka wasanrawannarkoba di wilayah perkotaan

## b. Metode Pengukuran

Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan alternatif adalah melalui Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) dengan melihat kondisi ketidakrawanan kawasan tersebut dibandingkan dengan kondisi kerawanan narkoba hasil pemetaan kerawanan narkoba sebelumnya.

Adapun perhitungan capaian jumlah kawasan yang mengalami keterpulihan kerawanan sebagai berikut :

*Perhitungan capaian:*

$\% \text{ Capaian} \quad : \quad \frac{1 \text{ kawasan}}{1 \text{ kawasan}} \quad \times 100\% = 100\%$
---

Dari data diatas jumlah kawasan/wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan alternatif adalah sebanyak 1 kawasan, dengan capaian target sebesar 100%.

## c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target jumlah kawasan/wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan alternatif sebesar 100% adalah:

- 1) Kawasan rawan yang diintervensi program pemberdayaan cukup responsif.
- 2) Stakeholder di kawasan rawan memiliki kepedulian dan komitmen dalam upaya pemulihan kawasan rawan secara berkelanjutan melalui penyebaran informasi P4GN, maupun pemberdayaan alternatif kelompok binaan di bidang pertanian hidroponik.
- 3) Pendekatan program pemberdayaan alternatif yang dilakukan cukup efektif, efisien dan tepat sasaran karena melalui beberapa tahapan kegiatan dengan melibatkan stakeholder terkait antara lain : pemetaan potensi kawasan rawan, rapat sinergitas dengan stakeholder dan bimbingan teknis dengan stakeholder.
- 4) Stakeholder di kawasan rawan memiliki kepedulian dan komitmen dalam upaya pemulihan kawasan rawan secara berkelanjutan melalui penyebaran informasi P4GN, maupun pemberdayaan alternatif kelompok binaan di bidang pertanian hidroponik agar masyarakat

memiliki aktifitas positif yang dapat menjadi aksi nyata di lingkungannya.

- 5) Tidak ada kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama intervensi program dan akan terus dimonitoring pada tahun berjalan.
- 6) Selain pemberdayaan alternatif, kawasan ini juga mendapatkan intervensi Rehabilitasi IBM dan Intervensi Desa Bersinar.

**d. Permasalahan atau Kendala**

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan alternatif juga mengalami beberapa kendala antara lain :

- 1) Anggaran yang tersedia hanya mampu memfasilitasi 15 Orang warga binaan, sementara masih banyak warga lainnya yang ingin mengikuti program kegiatan.
- 2) Waktu pelatihan yang direncanakan sangat singkat sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga kemampuan warga binaan dalam memproduksi pupuk masih perlu dikembangkan secara berkelanjutan.
- 3) Tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah dalam P4GN termasuk pengembangan kewirausahaan.
- 4) Minimnya kegiatan pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Minimnya bantuan modal usaha, terutama dari dunia usaha/swasta, termasuk BUMN/BUMD untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Kurang adanya sinergi/sinkronisasi program serupa dari pemerintah daerah, sehingga dukungan anggaran dan pelaksanaan program hanya dari BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur saja.

**e. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan jumlah kawasan/wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan alternatif, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder untuk melakukan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba.

- 2) Kegiatan P4GN disisipkan pada kegiatan-kegiatan yang sudah ada di tingkat desa/kelurahan.
- 3) Mendorong pemerintah daerah untuk mendukung P4GN dengan regulasi.
- 4) Bermitra dengan yayasan/LSM/Lembaga swasta dalam pemulihan kawasan rawan melalui pengembangan kewirausahaan.

**5.**

**Indikator Kinerja: Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi**

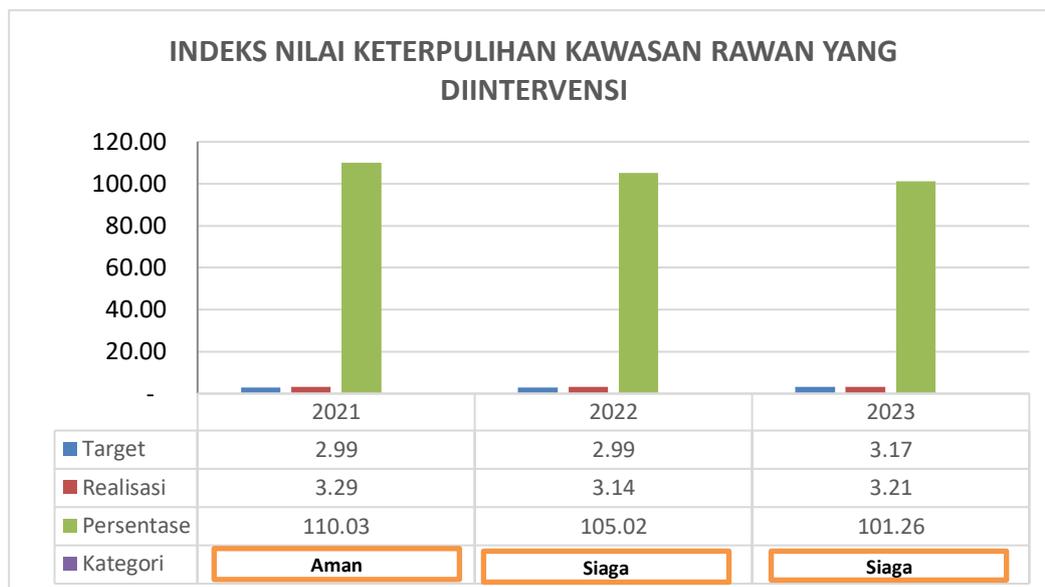
Keterpulihan kawasan rawan diukur menggunakan Indeks Keterpulihan Kawasan (IKKR). Indeks keterpulihan adalah angka indeks yang dihasilkan melalui proses perhitungan atas variabel, sub variabel dan indikator dari faktor-faktor yang menunjukkan perubahan keterpulihan dari kondisi semula (rawan narkoba) pada periode tertentu yang ditunjukkan dengan angka skala.

**a. Capaian indikator kinerja**

Target Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi sesuai Perjanjian kinerja dengan 3.17 indeks. Berdasarkan kegiatan pemberdayaan alternatif yang telah dilaksanakan BNNP NTT pada kawasan/wilayah rawan yang diintervensi dengan capaian indeks sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	3.17	3.21	101.3 %

Berikut disajikan data pembandingan realisasi Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 :



#### b. Metode Pengukuran

Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan alternatif adalah melalui Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) dengan melihat kondisi ketidakrawanan kawasan tersebut dibandingkan dengan kondisi kerawanan narkoba hasil pemetaan kerawanan narkoba sebelumnya.

Metode pengukuran Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) dalam pelaksanaan pemberdayaan alternatif diukur melalui 3 variabel dan 20 indikator yaitu: 8 indikator pokok kerawanan narkoba, 5 indikator pendukung, dan 7 indikator tingkat keberhasilan program dengan pembobotan sebagai berikut :

No	Variabel	Indikator	Bobot
1.	Indikator pokok kerawanan narkoba	Bandar narkoba	8
2.		Produksi narkoba	7
3.		Entry point narkoba	6
4.		Kurirnarkoba	5
5.		Pecandu narkoba	4
6.		Kasus narkoba	3
7.		Barang bukti narkoba	2
8.		Kejahatan umum	1

9.	Indikator pendukung	Tempat hiburan	5
10.		Angkakemiskinan	4
11.		Kos-kosan	3
12.		Sarana public	2
13.		Interaksi social	1
14.	Tingkat keberhasilan program	Hasil yang dirasakan masyarakat	7
15.		Keberlanjutan program	6
16.		Pelaksana program	5
17.		Pelaksanaan program	4
18.		Sinergi instansi pemerintah	3
19.		Kemitraan dunia usaha	2
20.		Dampak keberdayaan masy	1
		<b>Jumlah total (n = 1)</b>	<b>79</b>

Jawaban responden dari tiap-tiap indikator diatas dikalikan bobot sehingga diperoleh hasil indeks keterpulihan kawasan. Kemudian dari hasil indeks yang diperoleh dapat ditentukan kategori keterpulihan dengan interval sebagai berikut :

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKKR	KRITERIA PULIH
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	A	BAHAYA
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	B	WASPADA
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	C	SIAGA
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	D	AMAN

Adapun rincian capaian IKKR tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 4. Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) Tahun 2023**

NO	SATKER	KRITERIA	Tingkat Kerawanan Hasil Pemetaan	IKKR
1	BNNP NTT	Nilai IKKR Setelah Dikonversi	2.50	3,21
		Nilai Interval Konversi Dikalikan 25	62.50	80.25
		Kategori IKKR	<b>B</b>	<b>C</b>
		Kriteria Kawasan Rawan	<b>Waspada</b>	<b>Siaga</b>

Berdasarkan hasil survei indeks keterpulihan kawasan rawan narkoba di Kelurahan Oebobo Kota Kupang terhadap 15 responden (warga binaan dan stakeholder terkait) menunjukkan nilai IKKR sebesar 3,21 Indeks dengan kriteria Siaga. Berdasarkan hasil survey tersebut, kita dapat membandingkan dengan kondisi kerawanan pada awal pemetaan kawasan, dimana kategori kerawanan narkoba pada awal program berada di tingkat Waspada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat

kerawanan narkoba di Kelurahan Beirafu Kabupaten Belu pada akhir program pemberdayaan alternative menurun menjadi Siaga.

Adapun perhitungan capaian Nilai Keterpulihan Kawasan yang diintervensi sebagai berikut :

*Perhitungan capaian:*

<b>% Capaian</b>	:	$\frac{3,17 \text{ Indeks}}{3,21 \text{ Indeks}}$	x 100% =	101,3 %
------------------	---	---	----------	---------

Dari data diatas Nilai Keterpulihan Kawasan yang diintervensi dengan target 3.17 Indeks, melampaui capaian target yang ditetapkan yaitu sebesar 3.21 Indeks atau 101.3 %.

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor keberhasilan pencapaian Nilai Keterpulihan Kawasan yang diintervensi dengan target 3.17 Indeks, melebihi capaian target yang ditetapkan yaitu sebesar 3.21 Indeks atau 101.3 % adalah :

- 1) Kawasan rawan yang diintervensi program pemberdayaan cukup responsif.
- 2) Stakeholder di kawasan rawan memiliki kepedulian dan komitmen dalam upaya pemulihan kawasan rawan secara berkelanjutan melalui penyebarluasan informasi P4GN, maupun pemberdayaan alternatif kelompok binaan di bidang pertanian hidroponik.
- 3) Pendekatan program pemberdayaan alternatif yang dilakukan cukup efektif, efisien dan tepat sasaran karena melalui beberapa tahapan kegiatan dengan melibatkan stakeholder terkait antara lain : pemetaan potensi kawasan rawan, rapat sinergitas dengan stakeholder dan bimbingan teknis dengan stakeholder.
- 4) Stakeholder di kawasan rawan memiliki kepedulian dan komitmen dalam upaya pemulihan kawasan rawan secara berkelanjutan melalui penyebarluasan informasi P4GN, maupun pemberdayaan alternatif kelompok binaan di bidang pertanian hidroponik agar masyarakat memiliki aktifitas positif yang dapat menjadi aksi nyata di lingkungannya.

- 5) Tidak ada kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama intervensi program dan akan terus dimonitoring pada tahun berjalan.
- 6) Selain pemberdayaan alternatif, kawasan ini juga mendapatkan intervensi Rehabilitasi IBM dan Intervensi Desa Bersinar.

**d. Permasalahan atau Kendala**

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan alternatif juga mengalami beberapa kendala antara lain :

- 1) Anggaran yang tersedia hanya mampu memfasilitasi 15 Orang warga binaan, sementara masih banyak warga lainnya yang ingin mengikuti program kegiatan.
- 2) Waktu pelatihan yang direncanakan sangat singkat sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga kemampuan warga binaan dalam menciptakan produk pupuk kompos masih perlu dikembangkan secara berkelanjutan.
- 3) Tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah dalam P4GN termasuk pengembangan kewirausahaan.
- 4) Minimnya kegiatan pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Minimnya bantuan modal usaha, terutama dari dunia usaha/swasta, termasuk BUMN/BUMD untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Kurang adanya sinergi/sinkronisasi program serupa dari pemerintah daerah, sehingga dukungan anggaran dan pelaksanaan program hanya dari BNNP saja dan mitra bank sampah.

**e. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan jumlah kawasan/wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan alternatif, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder untuk melakukan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba.

- 2) Kegiatan P4GN disisipkan pada kegiatan-kegiatan yang sudah ada di tingkat desa/kelurahan.
- 3) Mendorong pemerintah daerah untuk mendukung P4GN dengan regulasi.
- 4) Bermitra dengan yayasan/LSM/Lembaga swasta dalam pemulihan kawasan rawan melalui pengembangan kewirausahaan.

## 6.

### Indikator Kinerja : Persentase penyala guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup

#### a. Capaian indikator kinerja

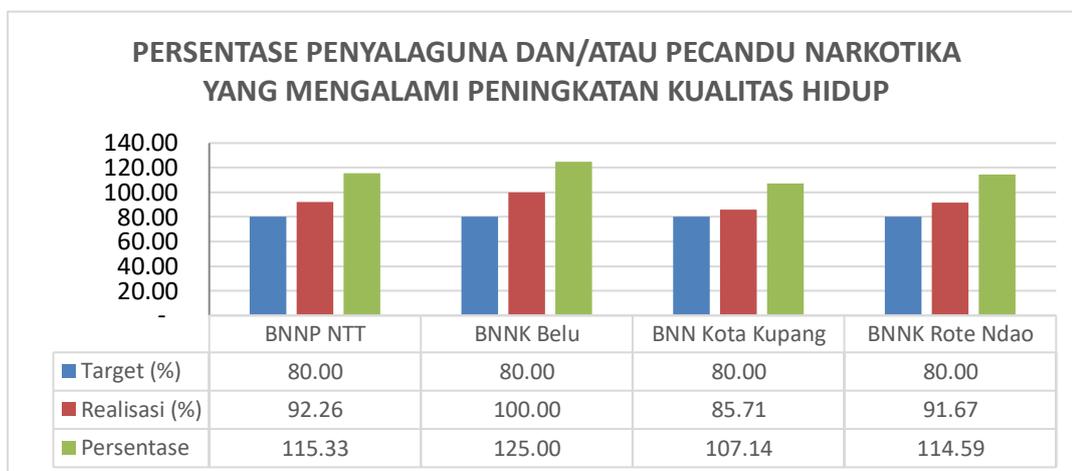
Indikator kinerja persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2023 sebesar 80%, dengan realisasi sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	80%	92.26%	115.3 %

Target capaian Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup BNNKab/Kota Jajaran sebagai berikut

No	BNNK	Target	Realisasi	%
1	Belu	80 %	100%	125%
2	Kota Kupang	80%	85.71%	107.1%
3	Rote Ndao	80%	91.67%	114.6%

Berikut disajikan data realisasi Persentase penyala guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup Jajaran BNN provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023.



**b. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor keberhasilan karena didukung Perencanaan dan Pelaksanaan Terhadap Upaya Pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba di Klinik BNNP dan Klinik BNNK jajaran serta Stakeholder terkait yang ada di masyarakat yaitu IBM telah terlaksana dengan baik.

**c. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Penyebaran Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Sosialisasi program rehabilitasi rawat jalan dan program IBM kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan pencegahan dan penyebaran informasi narkoba di Wilayah Kabupaten dan kota agar masyarakat sadar untuk mendapatkan layanan rehabilitasi.

## 7.

### Indikator Kinerja : Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

Definisi Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah petugas penyelenggara layanan IBM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis.

#### a. Capaian indikator kinerja

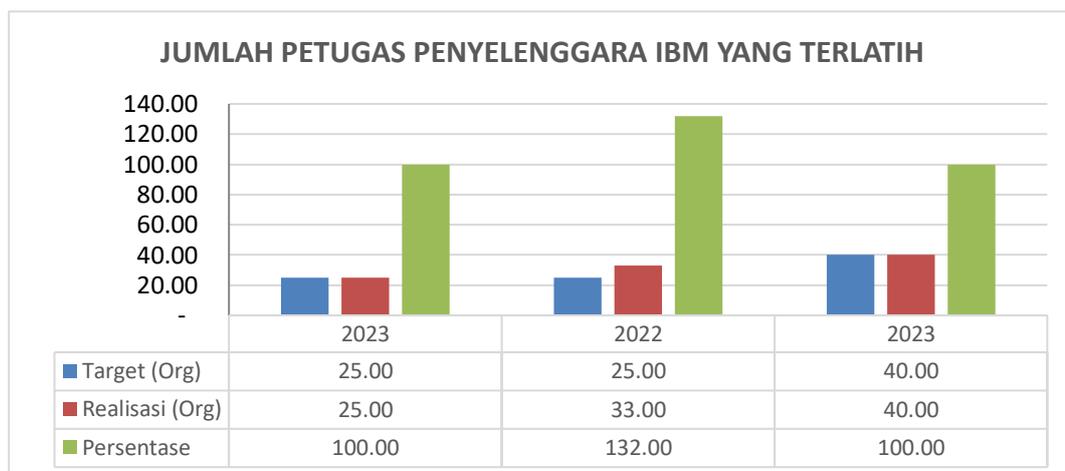
Indikator kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih target 40 orang. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Peningkatan kompetensi teknis petugas rehabilitasi melalui bimbingan teknis. Realisasi kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih target sebesar 40 orang dengan capaian kinerja sebesar 40 orang atau 100% melebihi target kinerja yang ditetapkan.

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Petugas Penyelenggara IBM yang terlatih	40 Orang	40 Orang	100 %

Target capaian Persentase jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih Jajaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

No	BNNK	Target	Realisasi	%
1	BNNP NTT	10 Orang	10 Orang	100%
2	Belu	10 Orang	10 Orang	100%
3	Kota Kupang	10 Orang	10 Orang	100%
4	Rote Ndao	10 Orang	10 Orang	100%

Berikut disajikan data pembandingan realisasi Jumlah Petugas Penyelenggara IBM yang terlatih tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.



#### **b. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor keberhasilan adalah Petugas IBM sudah mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penanganan Pecandu penyalahguna Narkoba.

#### **c. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Meningkatkan Sosialisasi program rehabilitasi bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran narkoba di Wilayah Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Memetakan kembali lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah yang akan diberi peningkatan kemampuan (mendapatkan penguatan, dorongan dan fasilitas) agar operasional.

### **8. Indikator Kinerja : Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis**

Indikator kinerja Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis target 5 orang. Anggaran untuk Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis untuk tahun 2023 tidak terealisasi/ terlaksana disebabkan karena adanya Pecandangan belanja / Automatic Adjustment (AA), sehingga menyebabkan target kinerja tidak tercapai.

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	-	0 %

Berikut disajikan data pembandingan realisasi Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.



**b. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor Kegagalan pencapaian target disebabkan karena anggaran mendukung capaian indikator diatas di blokir / Automatic Adjustment (AA).

**c. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Meningkatkan kapasitas petugas rehabilitasi melalui pelatihan secara berkala tentang layanan rehabilitasi.

**9.**

**Indikator Kinerja : Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di Wilayah Provinsi**

**a. Capaian indikator kinerja**

Indikator kinerja Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di Wilayah Provinsi target kinerja 1 lembaga. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran melakukan kegiatan Layanan Klinik Pratama. Realisasi kinerja Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi

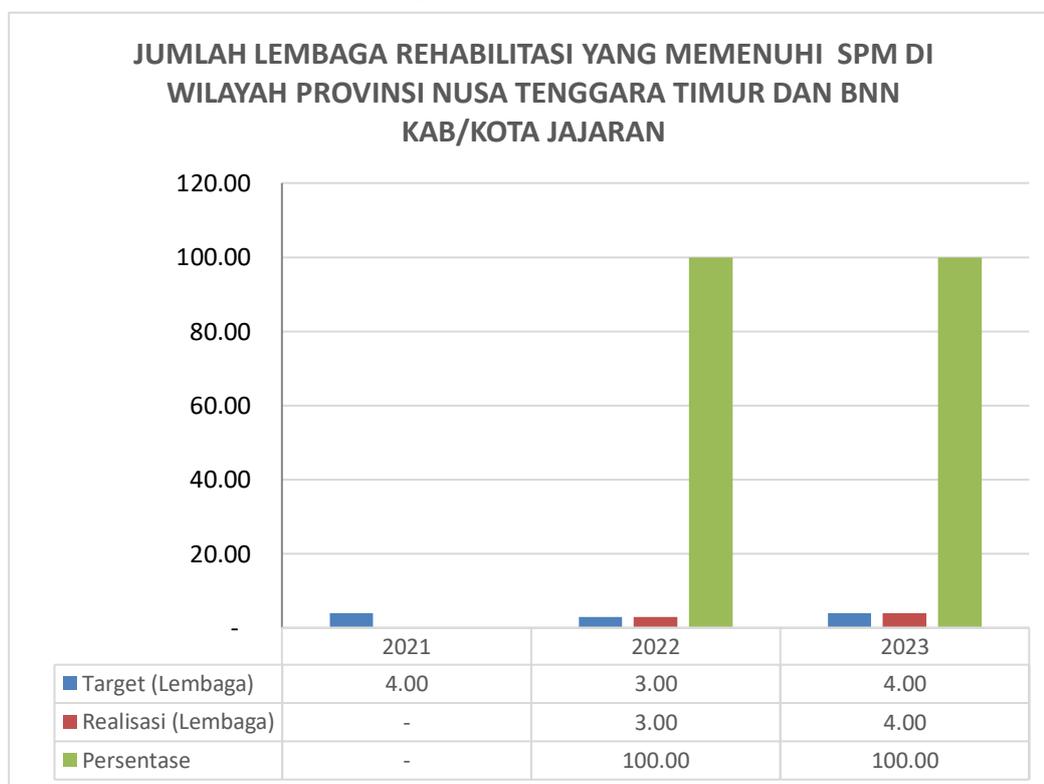
NTT 1 lembaga dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di Wilayah Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %

Target capaian Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional BNNKab/Kota Jajaran sebagai berikut :

No	BNNK	Target	Realisasi	%
1	Belu	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
2	Kota Kupang	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
3	Rote Ndao	1 Lembaga	1 Lembaga	100%

Berikut disajikan data perbandingan realisasi Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota Jajaran tahun 2021, 2022 dan tahun 2023



**b. Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah melalui penilaian identitas dan data demografi lembaga, komponen penilaian umum dan komponen penilaian khusus. Pada komponen identitas dan data demografi lembaga berisi tentang data umum lembaga rehabilitasi yang mencakup dasar hukum pendirian lembaga rehabilitasi, jenis layanan yang diberikan, hingga metode layanan yang digunakan dalam proses rehabilitasi penyalagunaan narkoba. Pada komponen penilaian umum terdapat 5 sub komponen yang menjadi dasar penilaian, yaitu kelembagaan, pelayanan, monitoring dan evaluasi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Sedangkan pada komponen penilaian khusus dibagi menjadi dua jenis layanan yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

*Perhitungan Capaian :*

<b>% Capaian</b>	:	$\frac{1 \text{ Lembaga}}{1 \text{ Lembaga}} \times 100\% = 100\%$
------------------	---	--

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor keberhasilan adalah ketiga lembaga yang dinilai sudah memenuhi standar penilaian melalui penilaian identitas dan data demografi lembaga, komponen penilaian umum dan komponen penilaian khusus.

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan/bimtek dan dukungan anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana layanan lembaga rehabilitasi.

Layanan intervensi merupakan salah satu upaya IBM dalam rangka membantu klien mencapai dan memelihara pemulihannya dari ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkoba, melalui screening individu dengan melibatkan kelompok dampingan pemulihan.

**a. Capaian indikator kinerja**

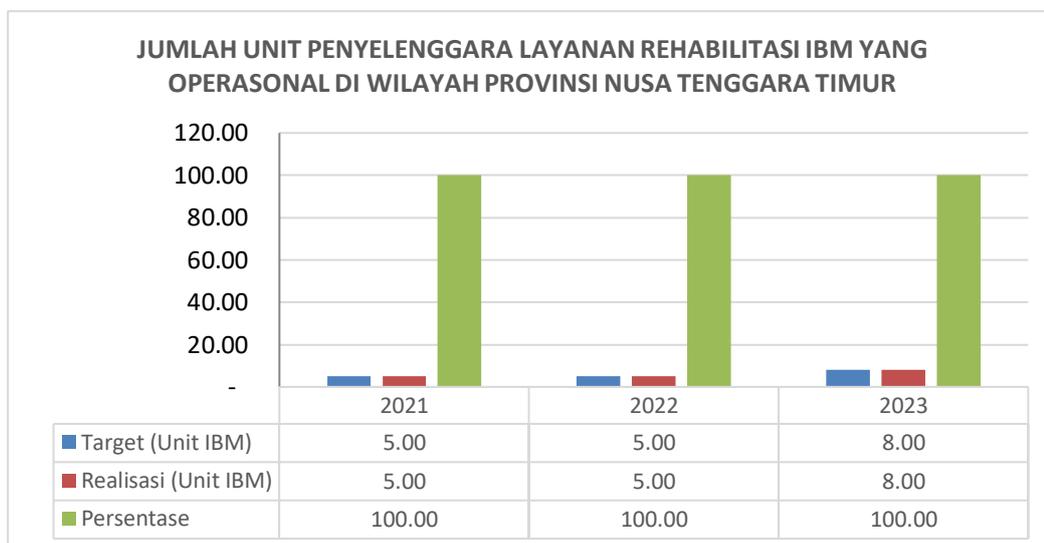
Indikator kinerja Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi target 8 unit. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran melakukan kegiatan Pembentukan unit IBM. Realisasi kinerja Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional sebesar 8 unit dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% , sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

No	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	8 unit	8 unit	100%

Target capaian Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional Jajaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut

No	BNNK	Target	Realisasi	%
1	BNNP NTT	2 Unit	2 Unit	100%
2	Belu	2 Unit	2 Unit	100%
3	Kota Kupang	2 Unit	2 Unit	100%
4	Rote Ndao	2 Unit	2 Unit	100%

Berikut disajikan data pembandingan realisasi Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.



#### b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan dengan pengukuran kualitas hidup kepada setiap klien dengan menggunakan formulir WHO-QOL dan URICA. Peningkatan kualitas hidup berdasarkan hasil evaluasi penilaian perubahan perilaku dengan menggunakan instrument rapor pemulihan mantan penyalah guna dan WHO-QoL. Dalam WHO-QoL mengukur 4 (empat) domain kehidupan mantan penyalah guna, yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial. Tujuan dilaksanakan pengisian WHO-QoL adalah untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan kualitas hidup dari setiap mantan penyalahguna, yang dibandingkan pada awal dan akhir layanan pasca rehabilitasi.

*Perhitungan Capaian :*

<b>% Capaian</b>	$\frac{8 \text{ Unit}}{8 \text{ Unit}}$	x 100%	= 100 %
------------------	---	--------	---------

#### c. Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

- 1) Kerjasama yang terjalin dengan baik dengan stakeholder turut mendukung program rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna.

- 2) Tenaga Rehabilitasi sudah mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penanganan Pecandu penyalahguna Narkoba.
- 3) Komitmen yang tinggi dari para penyelenggara program rehabilitasi milik instansi pemerintah dan Komponen Masyarakat.

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

- 1) Pemetaan kembali lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan Komponen masyarakat yang akan diberi peningkatan kemampuan (mendapatkan penguatan, dorongan dan fasilitas) agar operasional.
- 2) Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba.
- 3) Koordinasi dengan pembina teknis untuk meningkatkan fasilitas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan Komponen Masyarakat yang operasional.

**11.**

**Indikator Kinerja : Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitas narkotika**

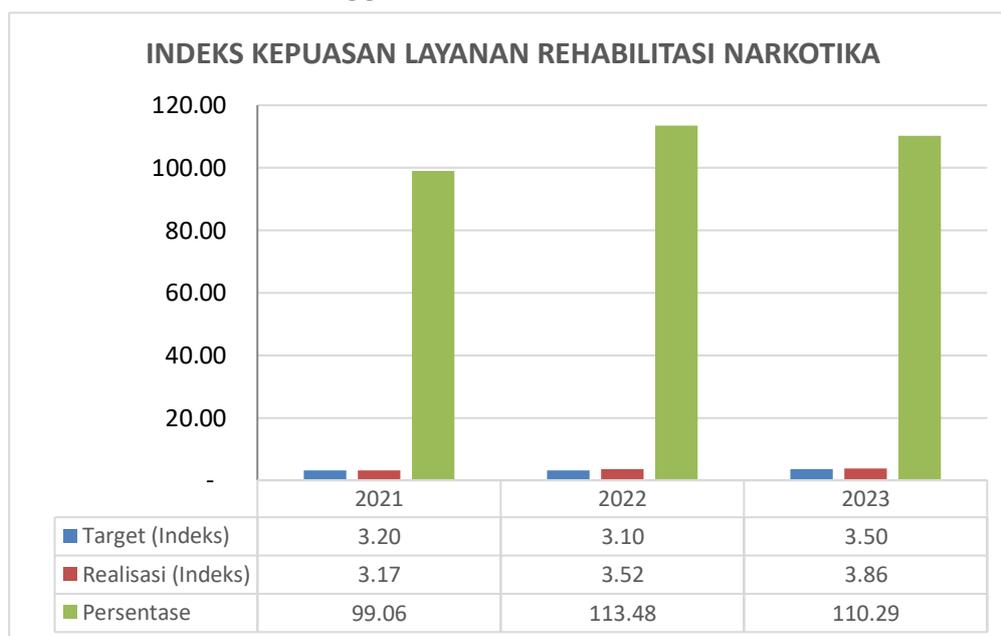
**a. Capaian indikator kinerja**

Indikator kinerja Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitas BNN di Provinsi target 3.5 Indeks sedangkan Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitas BNN Kab/Kota 3.86 Indeks . Untuk mendukung IKK tersebut Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Layanan Klinik Pratama kepada masyarakat. Realisasi kinerja Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3.86 dengan persentase capaian kinerja sebesar 110.3 %, melebihi mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian indikator kinerja Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

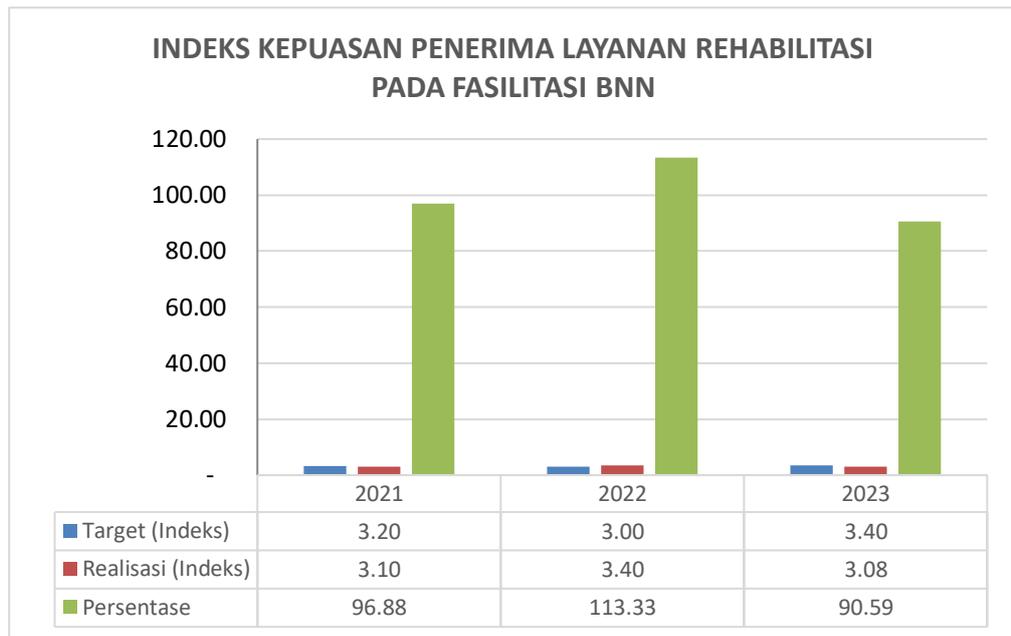
No	Satker	Target	Realisasi	% Realisasi
1	BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.5 Indeks	3.86 Indeks	110.3
2	BNN Kabupaten Belu	3.4 Indeks	3.08 Indeks	90.6
3	BNN Kota Kupang	3.4 Indeks	3.72 Indeks	109.4
4	BNN Kabupaten Rote Ndao	3.4 Indeks	4 Indeks	117.6

Berikut disajikan data pembandingan realisasi Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitas Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.

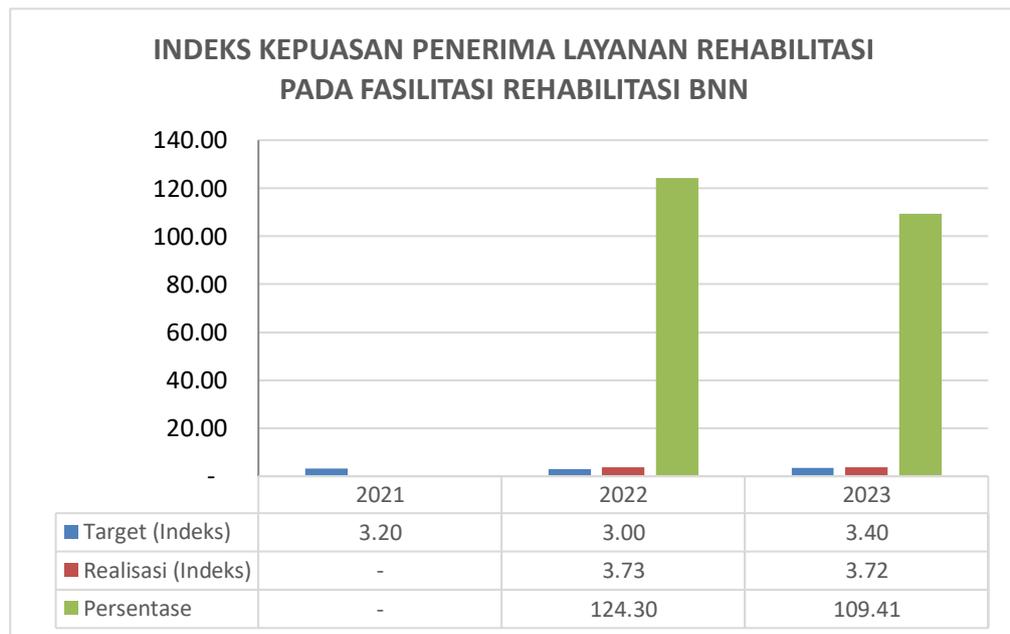
#### 1. BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur



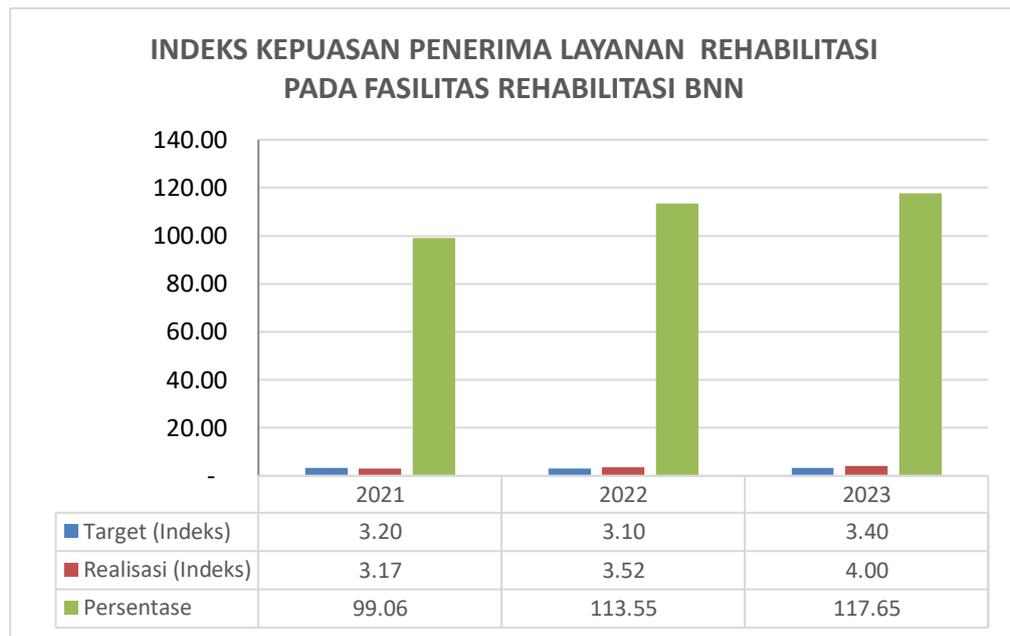
## 2. BNN Kabupaten Belu



## 3. BNN Kota Kupang



#### 4. BNN Kabupaten Rote Ndao



#### b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan adalah melalui survey kepuasan atas pemberian layanan yang berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} : \frac{3.5 \text{ indeks}}{3.86 \text{ indeks}} \times 100\% = 110.3 \%$$

#### c. Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Informasi mengenai layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Provinsi NTT sudah di respon oleh masyarakat Tenaga Rehabilitasi sudah mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penanganan Pecandu penyalahguna Narkoba.

#### d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk mendapatkan layanan rehabilitasi pada Klinik Pratama BNN Provinsi NTT dengan cara secara aktif melakukan sosialisasi.

12.

#### Indikator Kinerja : Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang P-21

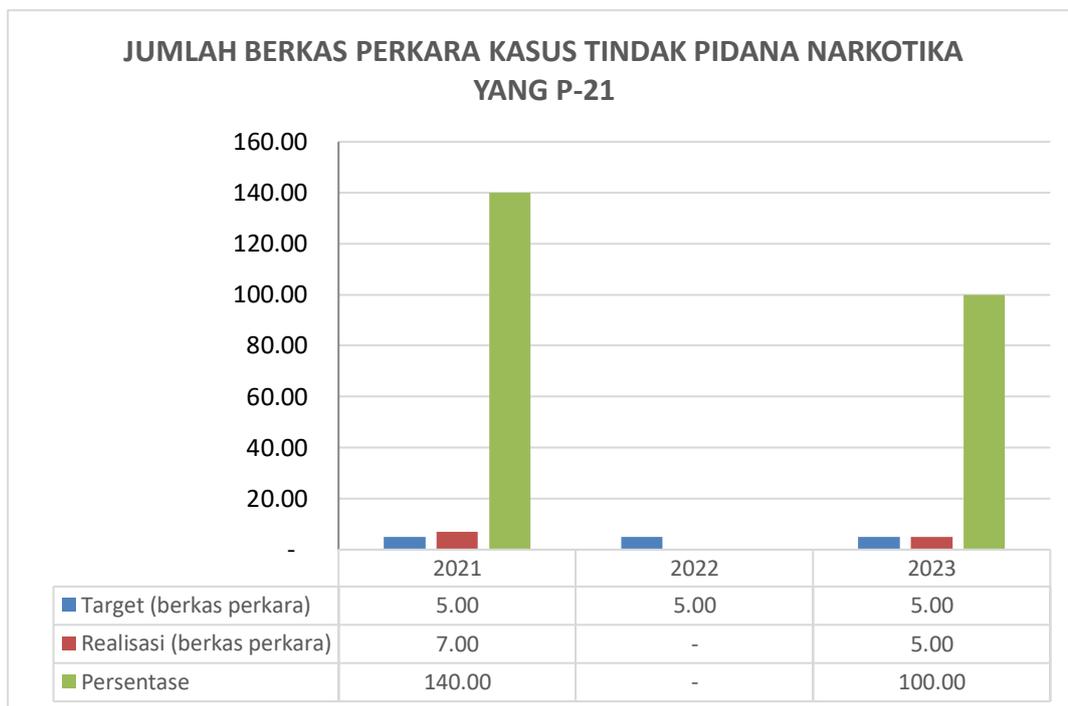
Kegiatan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja melalui Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan hasil output capaian kinerja dalam bentuk jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang terungkap dan terselesaikan sampai dengan P-21 dan tahap II (penyerahan berkas perkara dan barang bukti) ke JPU.

##### a. Capaian indikator kinerja

Perjanjian kinerja dengan target jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika yang P-21 dan tahap II ( penyerahan tersangka dan barang bukti) ke JPU, sebanyak 5 berkas perkara. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara. Realisasi kinerja mencapai target atau dengan persentase 100 %. Adapun rincian capaian kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	5 berkas perkara	5 berkas perkara	100 %

Berikut disajikan data pembandingan realisasi Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang P-21 tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.



#### b. Metode Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan atau ditentukan berdasarkan proses pengungkapan dan penyesuaian kasus yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pemberantasan, penyerahan berkas perkara (tahap I) ke JPU dan P-21 serta tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti, sebagai berikut :

*Perhitungan Capaian :*

<b>% Capaian</b>	: $\frac{5 \text{ berkas perkara}}{5 \text{ berkas perkara}}$	x 100% = 100 %
------------------	---	----------------

Realisasi kinerja Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 sebesar 5 berkas perkara dengan persentase capaian kinerja sebesar 100 %, mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

**c. Faktor Penyebab Kegagalan**

- 1) Letak geografis wilayah NTT, merupakan daerah kepulauan sehingga untuk mendapatkan kepastian informasi terhadap suatu target (TO) membutuhkan waktu beberapa hari dan anggaran yang memadai untuk sampai di daerah atau TKP tersebut.
- 2) Peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi NTT, dikategorikan masih rendah karena keadaan kehidupan ekonomi masyarakat, dimana harga narkoba untuk wilayah NTT sangat mahal (2,7 juta/gram), sehingga daya beli masyarakat rendah, dan yang mampu membeli hanya kalangan ekonomi menengah keatas yang berduit saja yang mampu membelinya, sedangkan masyarakat lokal kebanyakan mengkonsumsi minuman lokal (alkoho) yang berupa Sopi dan Moke.
- 3) Tidak didukung alat *narco test* dan alat test urine di bidang pemberantasan sehingga sulit untuk dilakukan pendeteksian awal pada saat operasi malam dan penangkapan.
- 4) Tidak tersedia *spy cam* (kamera tersembunyi) yang digunakan pada saat pemeriksaan untuk merekam semua pembicaraan tersangka pada saat diperiksa.

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam upaya meningkatkan jumlah capaian target berupa berkas perkara tindak pidana narkoba, maka BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, melakukan rencana aksi dan strategi kedepan sebagai berikut :

- 1) Harus adanya peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan yang mendukung kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkoba, khususnya ketika peredaran gelap narkoba yang terjadi di laut.
- 2) Harus adanya peningkatan kemampuan intelijen penyelidikan dan penyidik untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah NTT, khususnya penyelidikan intelijen yang berbasis IT.
- 3) Adanya peningkatan sistem koordinasi dengan instansi lain terkait jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah NTT.
- 4)

**a. Capaian indikator kinerja**

Kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan dengan target 100 indeks. Capaian indikator kinerja BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 terhadap pelaksanaan keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan sebesar 100 indeks atau 100 %, dengan rincian capaian sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai tingkat keamanan , ketertiban dan kesehatan tahanan	100 indeks	100 indeks	100%

Berikut disajikan data pembandingan Indeks Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban Dan Kesehatan Tahanan tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.



**b. Metode Pengukuran**

Dengan menggunakan metode pengukuran :

- 1) Jumlah tahanan yang masuk sama dengan jumlah tahanan yang keluar, termasuk keamanan, ketertiban, dan kesehatan terhadap tahanan mulai dari awal proses penahanan sampai dengan tahap II
- 2) proses penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU.

Rincian capaian sebagai berikut :

NO	Kasus	Jml Tahanan	Kesehatan	Nilai
1	Tahanan Masuk	3	100	100
2	Tahanan Keluar	3	100	100
	<b>Nilai</b>	100	100	100

*Perhitungan Capaian :*

$\% \text{ Capaian} \quad : \quad \frac{100 \text{ indeks}}{100 \text{ indeks}} \quad \times 100\% = 100 \%$
--

Dari data perhitungan tersebut diatas, maka nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan dengan capaian 100 Indeks atau sebesar 100%, mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan :**

1. Adanya pembagian tugas yang merata berupa piket jaga tahanan untuk semua anggota personil BNNP dan BNNK NTT untuk menjaga tahanan.
2. Kekompakan, kebersamaan dan semangat kerja yang tinggi semua personil dalam menjaga dan mengawasi tahanan.
3. Adanya kedisiplinan dari tahanan untuk mau mentaati semua peraturan di rutan BNNP NTT tersebut.
4. Adanya olah raga rutin setiap pagi bagi para tahanan dan adanya pengecekan kesehatan tahanan secara rutin.

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Untuk meningkatkan nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan, maka BNNP NTT dan BNNK/Kota akan melakukan rencana aksi dan strategi adalah :

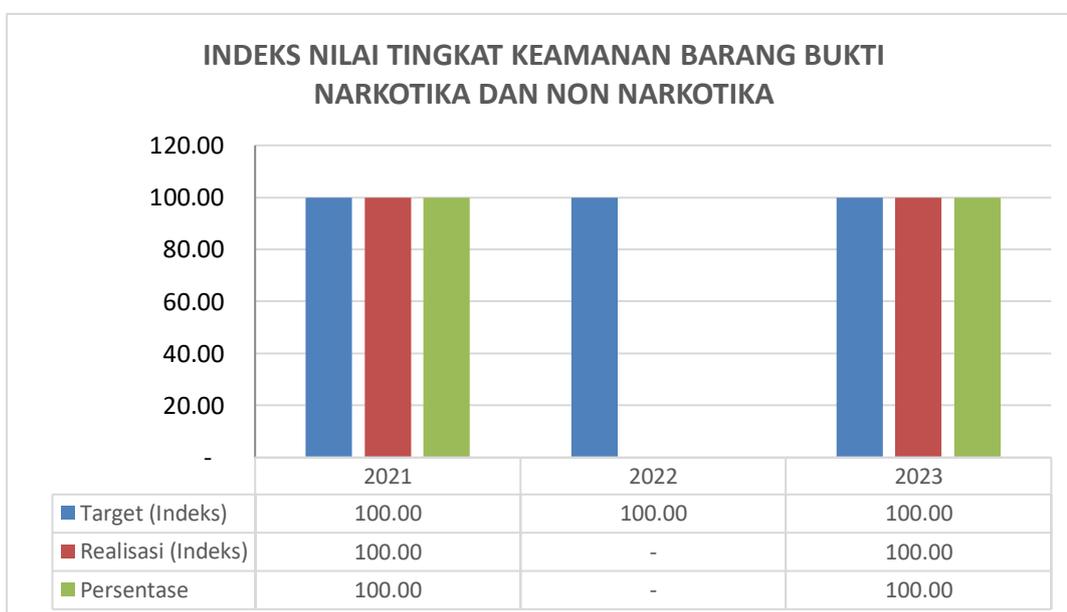
- 1) Pengadaan sarana prasarana, dan perlengkapan guna mendukung semua kegiatan pelaksanaan pengawasan tahanan.
- 2) Peningkatan kemampuan personil dalam Penyidikan Jaringan Peredaran Narkoba dan pengawasan tahanan melalui pembinaan, Pendidikan dan latihan khusus pengawasan tahanan.

**a. Capaian indikator kinerja**

Target kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti dan non barang bukti dengan target 100 indeks. Capaian kinerja BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 terhadap nilai tingkat keamanan barang bukti dan non barang bukti 100 indeks atau 100% tidak mencapai target kinerja, dengan rincian nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 indeks	100 indeks	100%

Berikut disajikan data pembandingan Indeks Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.



## b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran nilai keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah: jumlah barang bukti yang masuk, yang disita, berdasarkan surat perintah penyitaan terhadap barang bukti dan berita acara penyitaan barang bukti yang ditandatangani oleh pimpinan, sama dengan jumlah barang bukti yang dimusnahkan dan disisihkan untuk lain-lain sesuai yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

NO	Barang bukti	Barang buktimasuk	Barang buktidimusnahkan&Untukkeperluan lain (UU 35 Tahun 2009)
1	7,29 Gram (Shabu)	Februari 2023	7,29 Gram
2	649,91 Gram (Ganja)	Maret 2023	649,34 Gram
3	1,8130 Gram (Sabu)	Juni 2023	1,7492 Gram
4	2,29 Gram (Shabu)	Juni 2023	2.29 Gram
5	5,38 Gram (Shabu)	Oktober 2023	5,38 Gram

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} : \frac{100 \text{ indeks}}{100 \text{ indeks}} \times 100\% = 100 \%$$

Dari data perhitungan tersebut diatas, maka nilai keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika realisasi capaian kinerja 100 Indeks atau 100 %, mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

## c. Faktor Penyebab Keberhasilan :

1. Adanya upaya pribadi dari anggota untuk keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika.
2. Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik terhadap pihak instansi-instansi yang menangani pemeriksaan lab terhadap barang bukti narkotika dan non narkotika, agar keamanan terhadap barang bukti tetap terjaga dan terjamin..

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Untuk meningkatkan keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba akan melakukan rencana aksi dan strategi adalah:

1. Pengadaan tempat khusus penyimpanan BB narkoba dan non narkoba.
2. Pengadaan neraca (alat timbang) BB narkoba dan non narkoba.
3. Harus ada petugas khusus yang mengurus dan mengamankan BB, baik itu narkoba maupun non narkoba.

**15.**

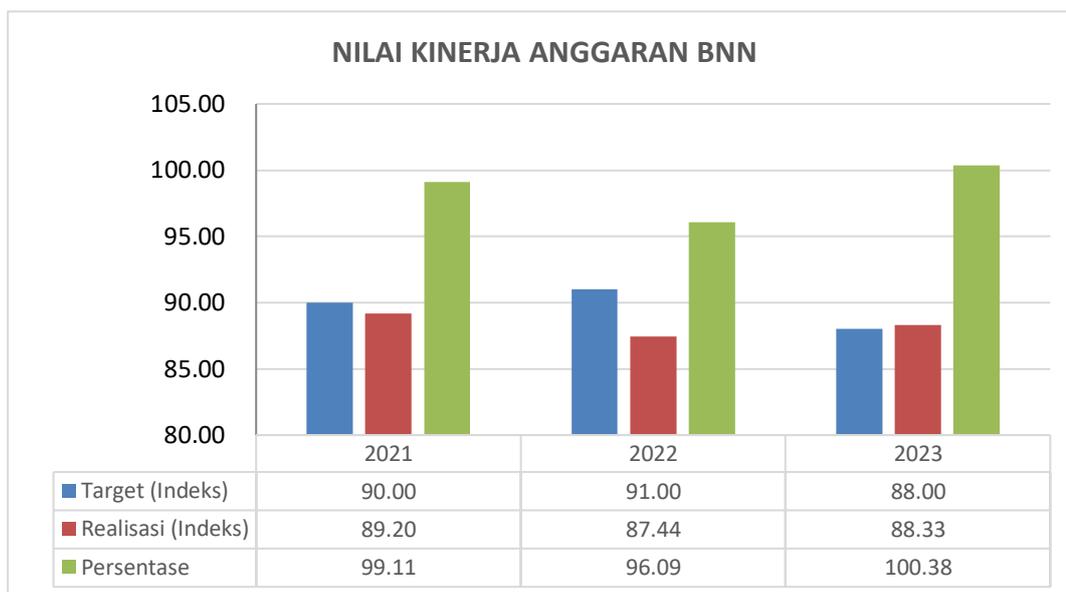
**Indikator Kinerja : Nilai Kinerja Anggaran BNN**

**a. Capaian indikator kinerja**

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BNN target Satker BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur target 88 Indeks. Sesuai dengan realisasi Nilai Kinerja data *SMART* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan Tahun 2023 BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 90.33 Indeks dengan persentase capaian kinerja sebesar 102.6 %, melebihi capaian target kinerja yang ditetapkan.

No	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88 indeks	90.33 indeks	102.6%

Berikut disajikan data pembandingan realisasi Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.



#### b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai kinerja anggaran adalah dilihat dari penyerapan anggaran, konsistensi, capaian keluaran kegiatan, efisiensi dan nilai efisiensi yang tersedia pada aplikasi Smart Kementerian Keuangan (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu), dengan rincian capaian sebagai berikut :

**Tabel Capaian Kinerja Aspek Implementasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur (data smart Kemenkeu Tahun 2023)**

Capaian Kinerja Aspek Implementasi							
No	Satker	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Rincian Output	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Pencapaian Kinerja
1	BNNP NTT	98.14	94.63	96.62	10.85	71.05	90.83

#### c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan/kegagalan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah :

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

- 2) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan Nilai kinerja anggaran BNN, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

**16. Indikator Kinerja : Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran BNN Mencapai Target**

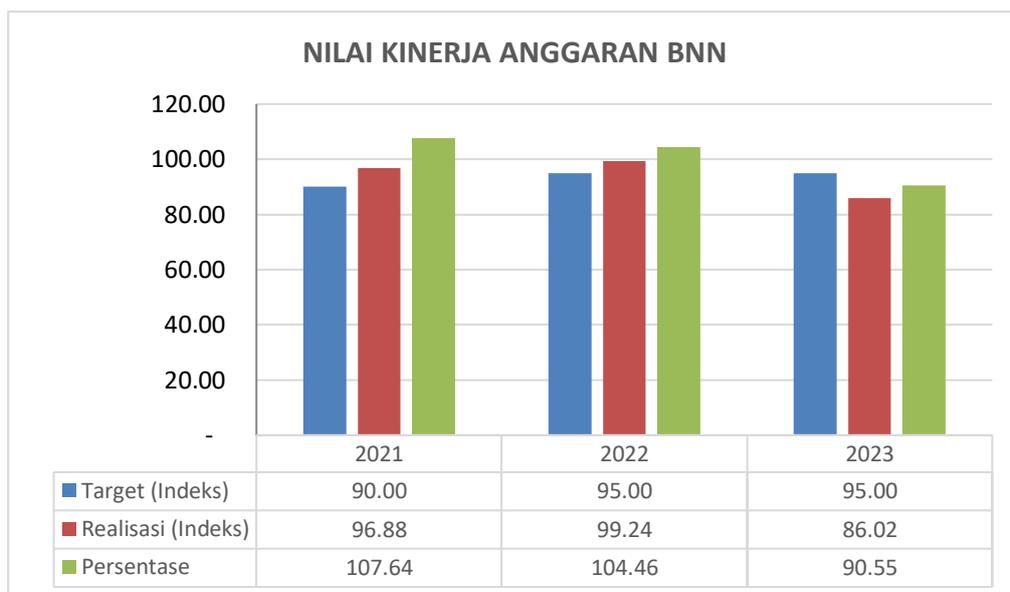
**a. Capaian indikator kinerja**

Indikator kinerja Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan nilai kinerja anggaran BNN, target : 1).BNN Kabupaten Belu target 95 Indeks; 2). BNN Kota Kupang target 87 Indeks; dan 3). BNN Kabupaten Rote Ndao target 83 Indeks. Sesuai dengan realisasi Nilai Kinerja data SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian, realisasi indikator kinerja Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran BNN Mencapai Target 3 BNN Kab/Kota sebesar 0 % . Data target dan realisasi Nilai Kinerja Anggaran BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi mencapai target sebagai berikut :

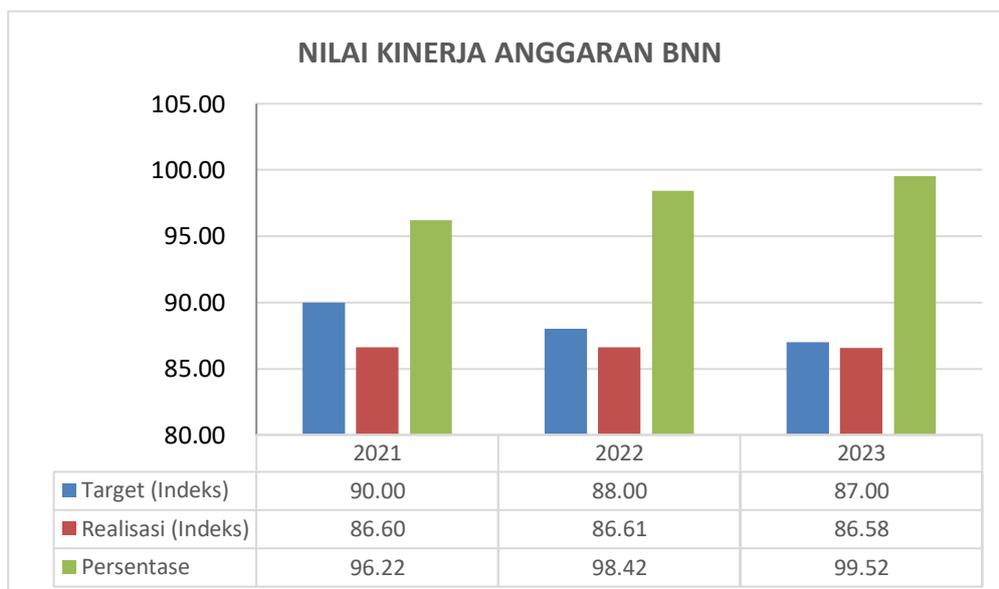
No	Satker	Target	Realisasi	% Realisasi
1	BNN Kabupaten Belu	95 indeks	86.02 indeks	90.55%
2	BNN Kota Kupang	87 indeks	86.58 indeks	90.5%
3	BNN Kabupaten Rote Ndao	83 indeks	79.16 indeks	95%

Berikut disajikan data perbandingan realisasi Nilai Kinerja Anggaran BNN Kab/Kota tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.

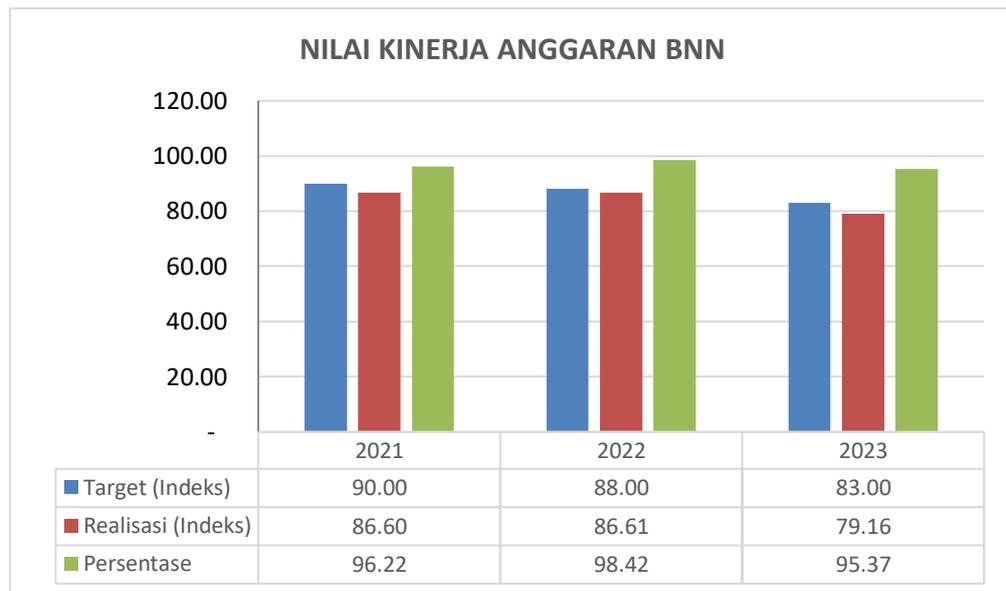
1. BNN Kabupaten Belu



## 2. BNN Kota Kupang



### 3. BNN Kabupaten Rote Ndao



#### b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai kinerja anggaran adalah dilihat dari penyerapan anggaran, konsistensi, capaian keluaran kegiatan, efisiensi dan nilai efisiensi yang tersedia pada aplikasi Smart Kementerian Keuangan (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu). dengan rincian capaian Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran BNN Mencapai Target sebagai berikut :

*Perhitungan Capaian :*

$$\text{Realisasi: } \frac{3 \text{ Kab/Kota}}{0 \text{ Kab/Kota}} \times 100\% = 0\%$$

#### c. Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor kegagalan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran disebabkan :

- 1) Kualitas Perencanaan Anggaran terutama Adanya deviasi hal III DIPA tidak mencapai target.

- 2) Kuantitas Pelaksanaan Anggaran pada Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagiahan dan Pengelolaan UP dan TUP tidak mencapai target.
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran pada capaian output tidak mencapai target.

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan Nilai kinerja anggaran BNN, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Anggaran dengan memperhatikan nilai deviasi hal III DIPA.
- 3) Meningkatkan Kuantitas Pelaksanaan Anggaran pada Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagiahan dan Pengelolaan UP dan TUP.
- 4) Meningkatkan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran pada capaian output.
- 5) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

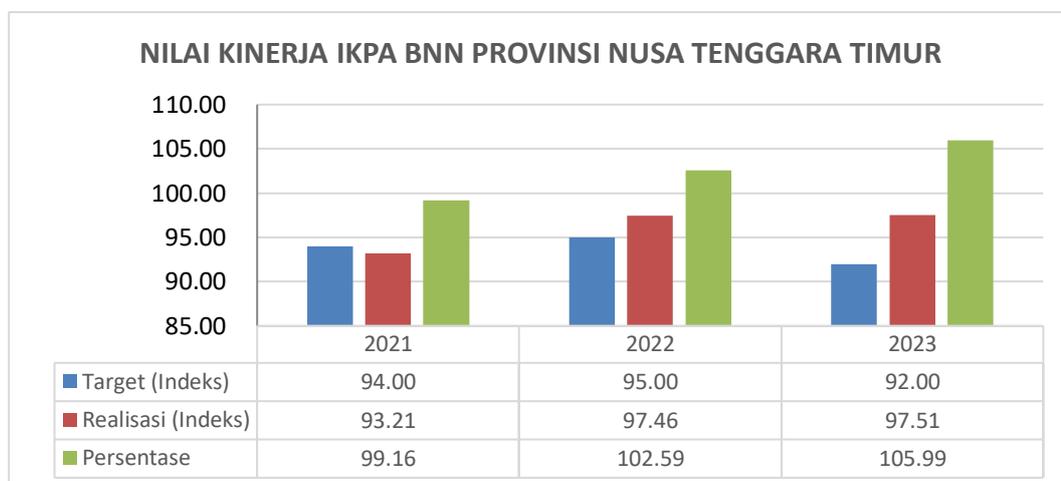
**17. Indikator Kinerja : Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

**a. Capaian indikator kinerja**

Nilai Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Target kinerja 92 Indeks . Sesuai dengan realisasi aplikasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan, IKPA BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 97.51 Indeks dengan persentase capaian kinerja sebesar 106 %, melebihi target yang telah ditetapkan. Data Nilai Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA.2023 :

No	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 indeks	97.51 indeks	106%

Berikut disajikan data pembandingan realisasi Nilai Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.



**b. Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah dilihat dari 3 aspek yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

*Perhitungan Capaian:*

92 Indeks	
Realisasi: _____	x 100% = 106 %
97.51 Indeks	

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor keberhasilan/kegagalan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah :

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
- 2) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.

#### d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan Nilai kinerja anggaran BNN, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

**18.**

### **Indikator Kinerja : Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target**

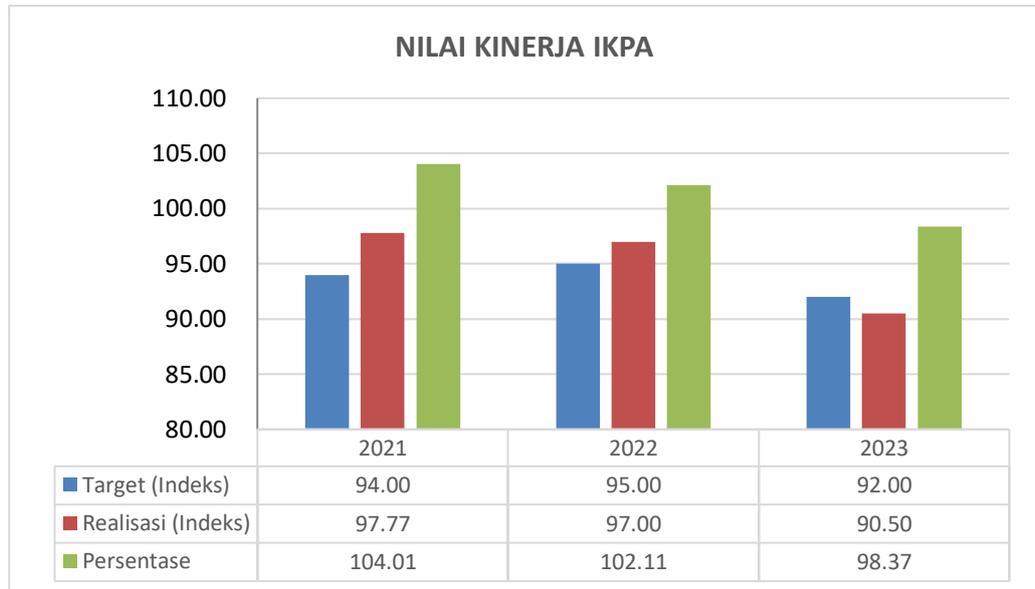
#### a. Capaian indikator kinerja

Nilai Kinerja Indikator Kinerja Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target 3 BNN Kab/Kota. Sesuai dengan realisasi aplikasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan pada ketiga Satker BNN Kab/Kota realisasi IKPA ketiga BNN Kab/Kota yaitu BNN Kabupaten Belu tidak mencapai target, BNN Kota Kupang dan BNN Kabupaten Rote Ndao melebihi target IKPA yang telah ditetapkan. Data Nilai Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) masing-masing BNN Kab/Kota Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur TA.2023 :

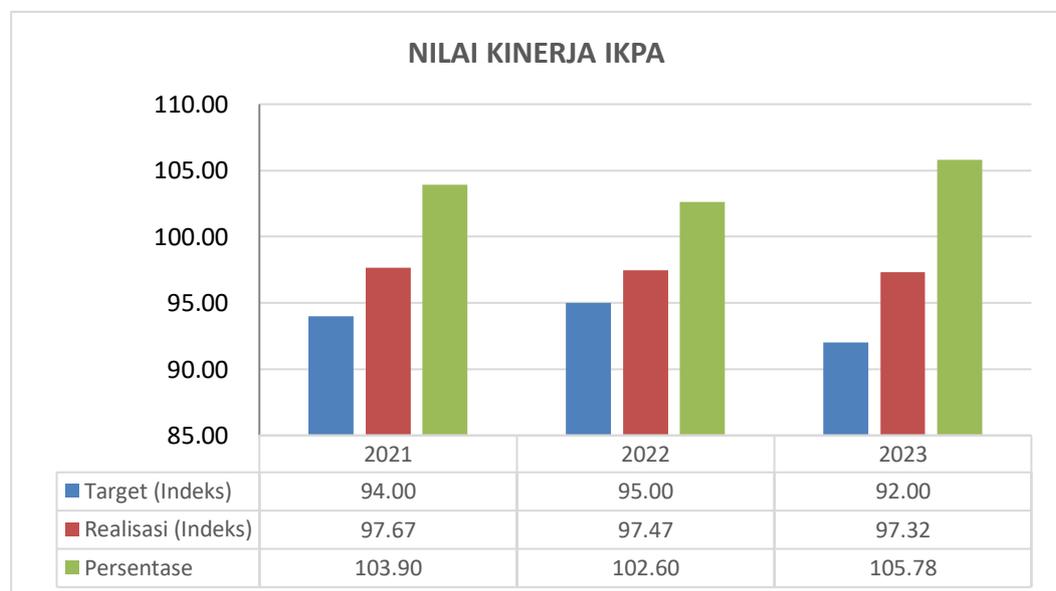
No	Satker	Target	Realisasi	% Realisasi
1	BNN Kabupaten Belu	92 indeks	90.50 indeks	98.4%
2	BNN Kota Kupang	92 indeks	97.32 indeks	105.8%
3	BNN Kabupaten Rote Ndao	92 indeks	97.23 indeks	105.7%

Berikut disajikan data pembandingan realisasi Nilai Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) masing-masing BNN Kab/Kota Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.

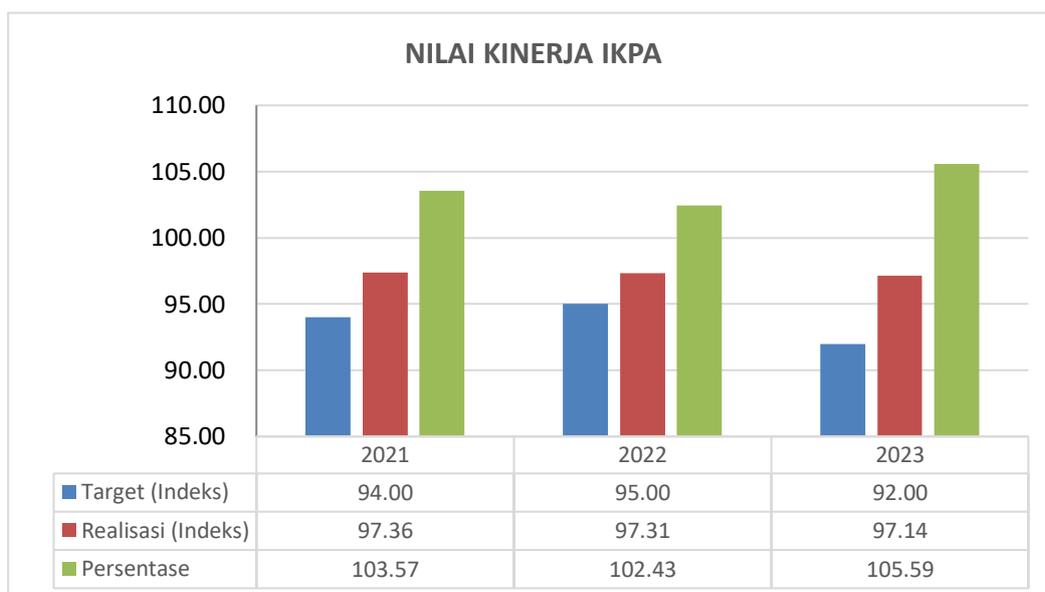
1. BNN Kabupaten Belu



2. BNN Kota Kupang



### 3. BNN Kabupaten Rote Ndao



#### b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah dilihat dari 3 aspek yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target :

Perhitungan:

$\text{Realisasi: } \frac{3 \text{ Kabupaten/Kota}}{2 \text{ Kabupaten/Kota}} \times 100\% = 66.7\%$
--

#### c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah :

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
- 2) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.

Faktor kegagalan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran disebabkan :

- 1) Kualitas Perencanaan Anggaran terutama Adanya deviasi hal III DIPA tidak mencapai target.
- 2) Kuantitas Pelaksanaan Anggaran pada Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagiahan dan Pengelolaan UP dan TUP tidak mencapai target.
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran pada capaian output tidak mencapai target.

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran , maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Anggaran dengan memperhatikan nilai deviasi hal III DIPA.
- 3) Meningkatkan Kuantitas Pelaksanaan Anggaran pada Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagiahan dan Pengelolaan UP dan TUP.
- 4) Meningkatkan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran pada capaian output.

**19.**

**Indikator Kinerja : Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal**

**a. Capaian indikator kinerja**

Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal tahun 2023 dengan target 75 Indeks . Sesuai dengan penilaian internal dari Inpektur Utama BNN capaian Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 71.52 Indeks dengan persentase capaian kinerja sebesar 95.4 %, tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Data Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal TA.2023 :

No	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75 indeks	71.52 indeks	95.4%

Berikut disajikan data pembandingan realisasi Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.



#### b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal adalah dilihat dari 3 aspek yaitu Pemenuhan, Reform dan Hasil.

*Perhitungan Capaian:*

$$\text{Realisasi: } \frac{71.52 \text{ Indeks}}{75 \text{ Indeks}} \times 100\% = 95.4\%$$

#### c. Faktor Penyebab Kegagalan

Pembangunan zona integritas diakhir tahun sehingga pemenuhan dokumen pembangunan pada area Manajemen Perubahan, Manajemen Tata Laksana, Manajemen Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tidak maksimal.

#### d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

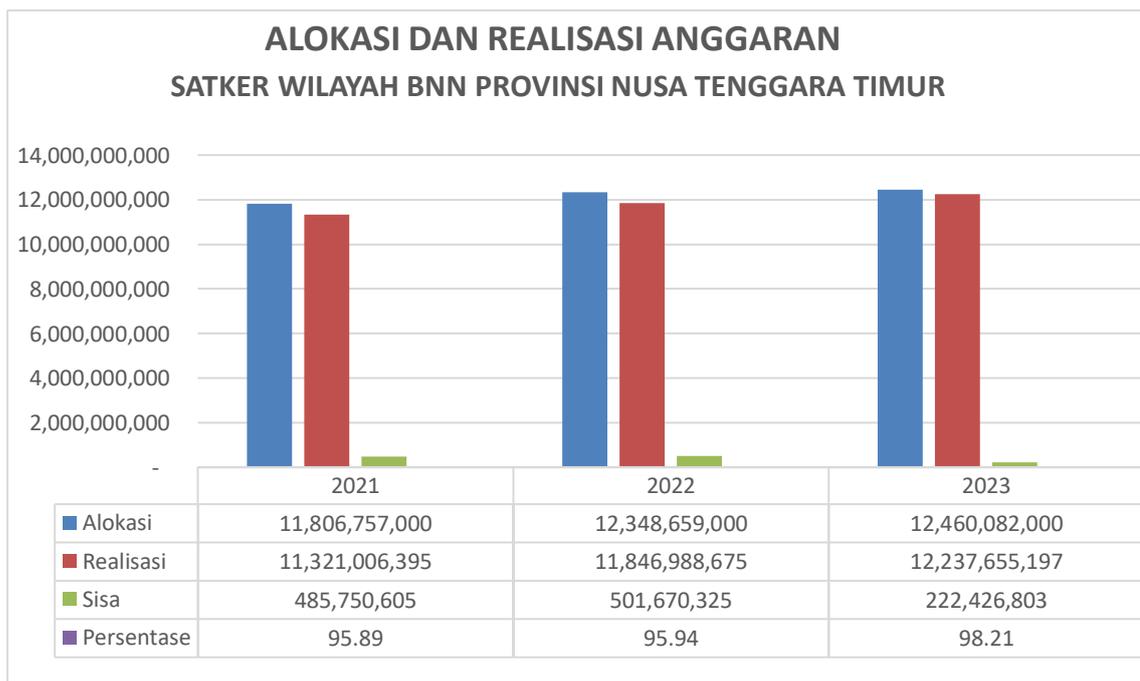
Dalam usaha meningkatkan Nilai zona integritas , maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan di awal tahun.
- 2) Meningkatkan komitmen tim pembangunan Zona integritas dalam mengimplementasikan pembangunan yang berfokus pemenuhan dokumen pendukung pada area Manajemen Perubahan, Manajemen Tata Laksana, Manajemen Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

### B. REALISASI ANGGARAN

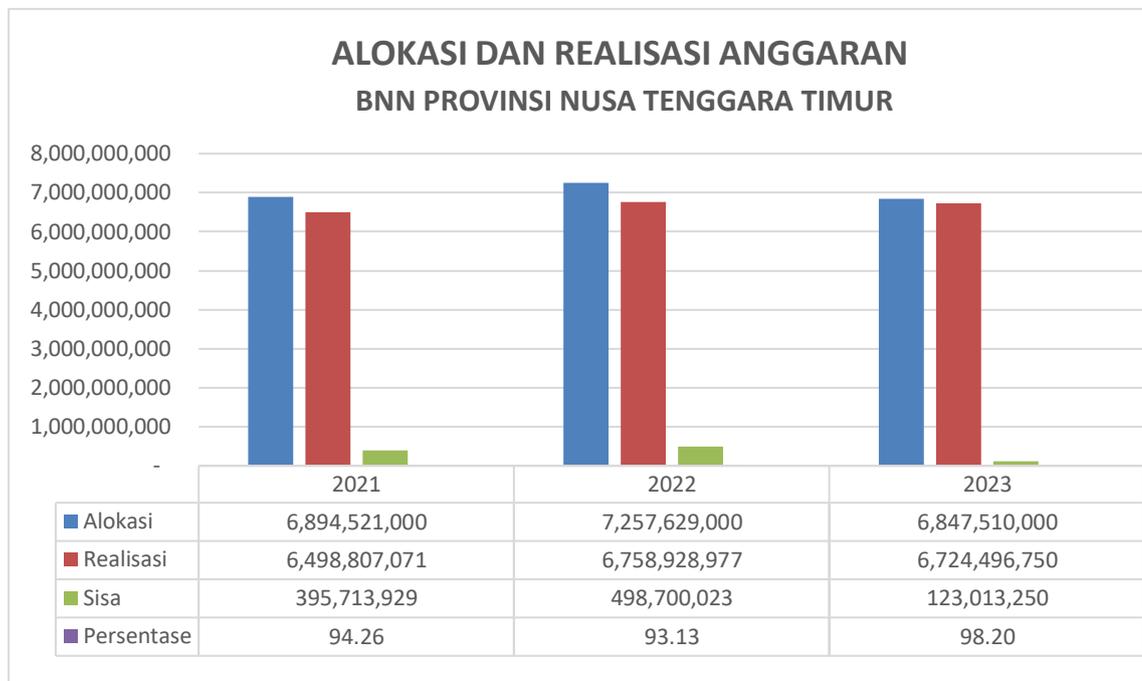
Pada Tahun 2023 Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 12.460.082.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 12.237.655.197,- atau setara dengan 98.21 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 222.426.803,- atau setara dengan 1.79 % anggaran yang tidak terserap.

Data pembandingan realisasi anggaran Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

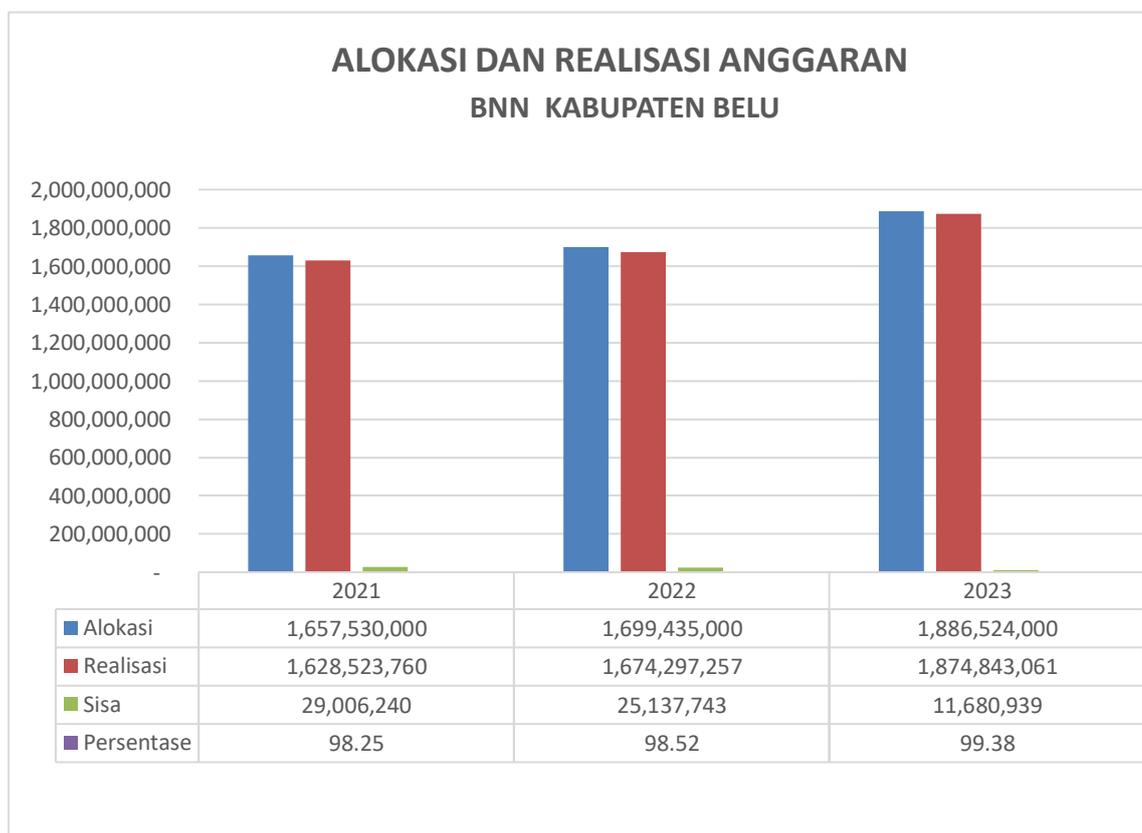


Data perbandingan realisasi anggaran per masing-masing Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

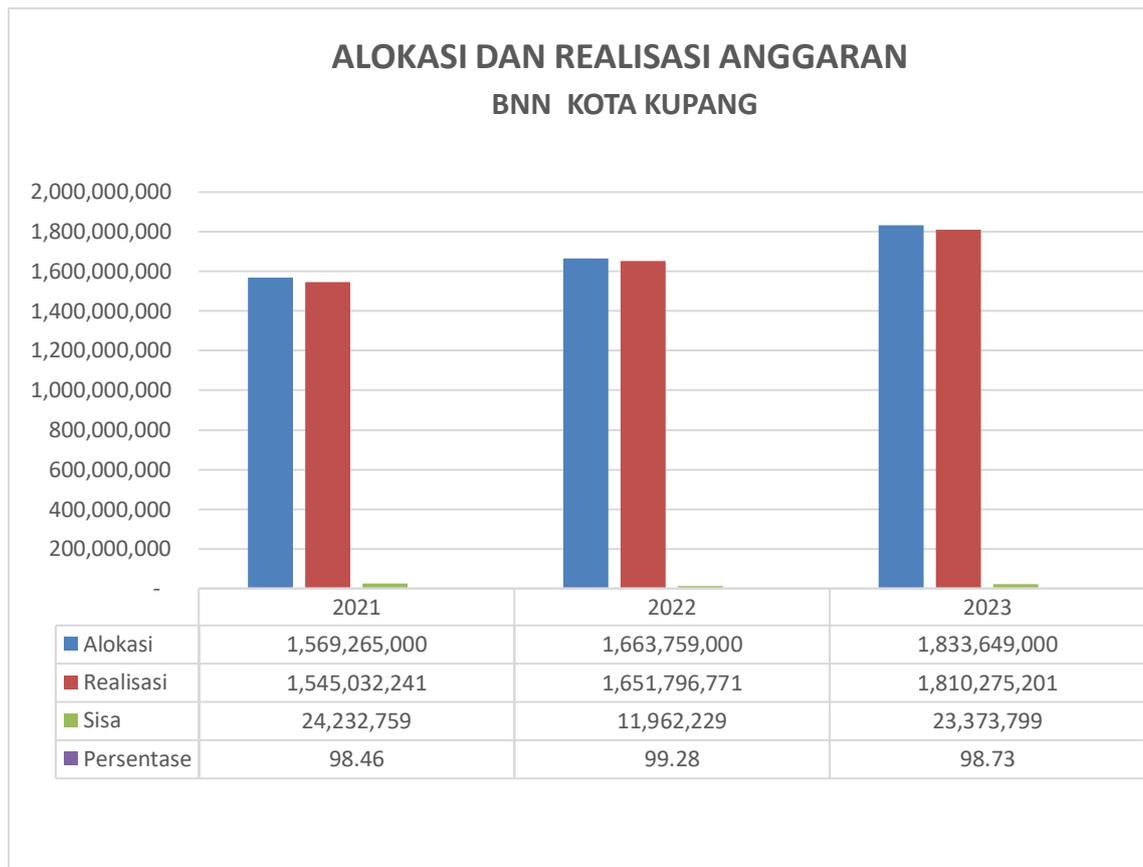
### 1. BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur



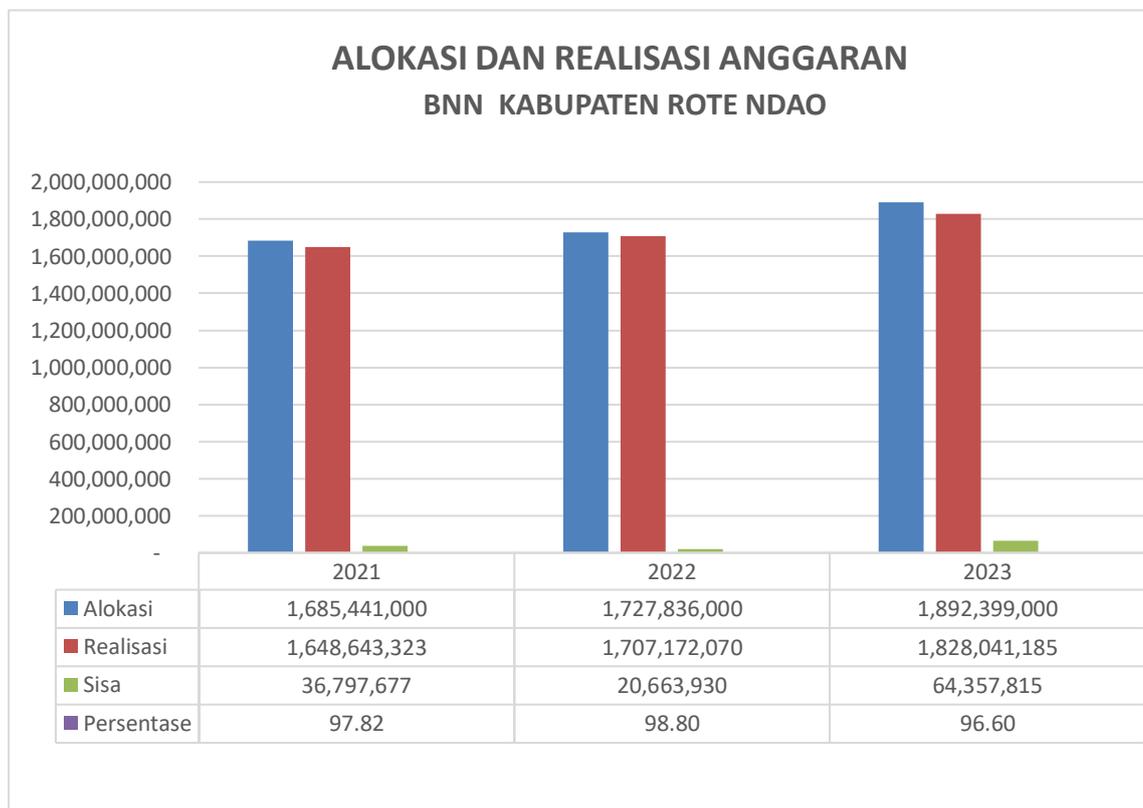
### 2. BNN Kabupaten Belu



### 3. BNN Kota Kupang



### 4. BNN Kabupaten Rote Ndao



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Hasil pengukuran kinerja indikator kinerja kegiatan (IKK) menunjukkan sebagian besar indikator pada IKK telah tercapai bahkan ada beberapa indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan. Meskipun demikian masih ada beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum maksimal, namun dengan segala keterbatasan yang ada telah dilakukan berbagai strategi dan upaya optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Realisasi anggaran Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 mencapai Rp.12.237.655.197,- atau 98.21 % dari Pagu Anggaran 12.460.082.000,-, dengan sisa anggaran Rp. 222.426.803,- atau setara dengan 1.79 %. Meskipun realisasi keuangannya tidak mencapai 100%, namun sebagian besar sisa anggaran di Tahun 2023 sebagai bentuk efisiensi anggaran.

### **B. Saran dan Masukan**

1. Penguatan Sumber Daya Manusia bagi semua pegawai Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan meningkatkan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan bagi personil dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kinerja personil untuk mendukung capaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan.
2. Mengoptimalkan Koordinasidan peran aktif *stakeholder* dan masyarakat dalam program P4GN di daerah.

3. Meningkatkan kerjasama dan peran aktif media-media lokal dan nasional untuk membantu mensosialisasikan bahaya narkoba di masyarakat.
4. Akselerasi pembentukan kelembagaan BNNK di Provinsi Nusa Tenggara Timur di 19 (sembilan belas) Kabupaten.

Kupang, 29 Januari 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Riki Yanuarfi, S.H., M.Si

**LAMPIRAN**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI CAPAIAN TARGET DAN ANGGARAN**  
**SATKER WILAYAH BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	100.00	P4GN	306.110.000	305.860.000	99.92
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	100.00		409.300.000	408.840.000	99.89
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah Provinsi	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	100.00		845.990.000	845.657.900	99.96
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 kawasan	1 kawasan	100.00		101.500.000	101.500.000	100.00
	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3.17 Indeks	3.21 Indeks	101.30				
Meningkatkan upaya pemulihan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	80 %	80 %	100.00				
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih	40 Orang	40 Orang	100.00		166.069.000	162.914.000	98.10
	Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	- Orang	0.00				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100.00	Dukungan Manajemen	525.501.000	477.865.072	90.94
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	8 Unit	8 Unit	100.00				
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3.5 Indeks	3.86 Indeks	110.30		62.534.000	44.085.000	70.50
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	5 berkas perkara	5 berkas perkara	100.00		416.246.000	411.230.360	98.80
						75.000.000	74.999.677	100.00
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100.00		111.090.000	56.574.000	50.93
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100.00				
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88 Indeks	90.33 Indeks	102.60	Dukungan Manajemen	9.440.742.000	9.348.129.188	99.02

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	3 BNN Kabupaten / Kota	0 BNN Kabupaten / Kota	0.00				
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	92 Indeks	97.51 Indeks	106.00				
	Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	3 BNN Kab / Kota	2 BNN Kab / Kota	66.70				
<b>Total</b>						12.460.082.000	12.237.655.197	98.21

Pagu Anggaran : Rp. 12.460.082.000,-  
Total Realisasi Pagu Anggaran : Rp. 12.237.655.197,-  
Prosentase : 98.21 %

Kupang, 29 Januari 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Riki Yanuarfi, S.H., M.Si



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : RIKI YANUARFI, S.Sos, S.H., M.Si**

**Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE**

**Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**Dr. PETRUS R. GOLOSE**

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**RIKI YANUARFI, S.Sos, S.H., M.Si**

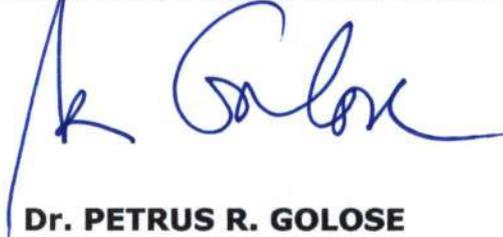
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,17 Indeks
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	80 %
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	40 Orang
8	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
10	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	8 Unit
11	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3,5 Indeks
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	5 Berkas Perkara
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88 Indeks
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	3 Kabupaten/Kota
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kabupaten/Kota
19	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.357.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.410.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.894.540.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.101.500.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.227.184.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.461.406.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.62.534.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.75.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.450.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.164.735.000
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.3.590.096.000
12. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.106.172.000
13. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.158.978.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.5.686.118.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.95.000.000

Pihak Kedua,  
**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

  
**Dr. PETRUS R. GOLOSE**

Magelang, 06 Februari 2023  
Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR**

  
**RIKI YANUARFI, S.Sos, S.H., M.Si**



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELU  
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini,

**Nama : MUHAMMAD RIZAL, S.Sos**  
**Jabatan : KEPALA BNN KAB BELU**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : RIKI YANUARFI, S.Sos, S.H., M.Si.**  
**Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

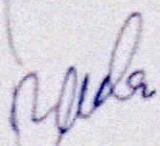
Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KAB BELU**

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI  
NUSATENGGARA TIMUR**

  
**RIKI YANUARFI, S.Sos, S.H., M.Si.**

  
**MUHAMMAD RIZAL, S.Sos**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELU**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	80 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Unit
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,4 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	95 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi                  | Rp.77.000.000  |
| 2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi                           | Rp.100.000.000 |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat                | Rp.215.586.000 |
| 4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Rp.15.200.000  |

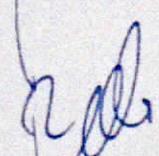
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.116.212.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.4.271.000
7. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.126.798.000
8. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.19.772.000
9. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.33.280.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.138.405.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000

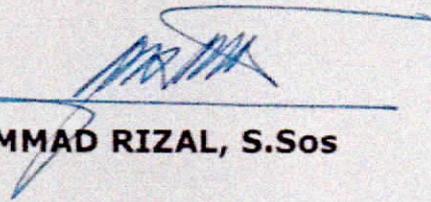
Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,  
**KEPALA BNN PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR**

**KEPALA BNN KAB BELU**

  
**RIKI YANUARFI, S.Sos, S.H.,M.Si.**

  
**MUHAMMAD RIZAL, S.Sos**



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPANG  
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : DOMINIKUS TUPEN SABON, S.Pt**

**Jabatan : PIt. KEPALA BNN KOTA KUPANG**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : RIKI YANUARFI, S.Sos, S.H.,M.Si.**

**Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI  
NUSATENGGARA TIMUR**

**RIKI YANUARFI, S.Sos, S.H.,M.Si.**

Pihak Pertama,

**PIt. KEPALA BNN KOTA  
KUPANG**

**DOMINIKUS TUPEN SABON, S.Pt**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPANG**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	77 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	80 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,4 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

1. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.100.000.000
2. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.4.771.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.215.586.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.13.750.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.13.750.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.13.750.000
7. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.103.481.000
8. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.75.000.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.97.500.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.19.772.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.23.340.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.121.425.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

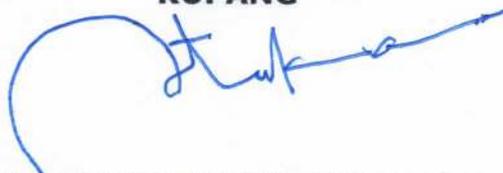
**KEPALA BNN PROVINSI  
NUSATENGGAH TIMUR**



**RIKI YANUARFI, S.Sos, S.H., M.Si.**

Pihak Pertama,

**Pt. KEPALA BNN KOTA  
KUPANG**



**DOMINIKUS TUPEN SABON, S.Pt**



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : HENDRIK JOHANNES ROHI, S.H.,MH**  
**Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN ROTE NDAO**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : RIKI YANUARFI, S.Sos, S.H.,M.Si.**  
**Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
**KEPALA BNN PROVINSI  
NUSATENGGARA TIMUR**

**RIKI YANUARFI, S.Sos, S.H.,M.Si.**

Magelang, 06 Februari 2023  
Pihak Pertama,  
**KEPALA BNN KABUPATEN  
ROTE NDAO**

**HENDRIK JOHANNES ROHI, S.H.,MH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ROTE NDAO**

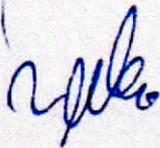
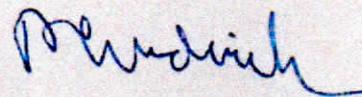
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	76.7 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.22 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	80 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.4 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	83 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.75.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.100.000.000
3. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.7.487.000
4. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.215.586.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.12.145.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.98.836.000
7. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.151.716.000
8. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.19.268.000
9. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.30.780.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.095.181.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA BNN PROVINSI  
 NUSATENGGAH TIMUR**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BNN KABUPATEN  
 ROTE NDAO**

**RIKI YANUARFI, S.Sos, S.H.,M.Si. HENDRIK JOHANNES ROHI, S.H.,MH**

